**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) JEMBER**

Khoirul Umam

NIM: 211105030019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Khoirul Umam
NIM : 211105030019
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Khoirul Umam

NIM : 211105030019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Denari Dhanana Edtivorsih, S.A., M.A
NIP. 199501082022032001

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) JEMBER**

SKRIPSI

Telah di setujui dan di sahkan
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

Sekretaris

H. Muzayyin, S.E.I., M.E
NIP. 1972808142023211011

Anggota :

1. Nur Ika Mauliyah, M.Ak
2. Dhenari Dhanana Edtiyarsih, S.A., M.A

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl [16] : 90).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al Qu'an, An-Nahl (16) : 90

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari awal mula penulisan Skripsi ini tentu tidak akan ada kata mudah dalam proses pengerjaan, pasti akan penuh dengan drama emosional, sedih, kesal, marah, sabar dan tentu yang paling penting adalah bahagia. Maka dalam menghadapi itu semua harus adanya dorongan dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Dan Alhamdulillah, sekarang penulis telah berada di ambang final kelulusan dar ujian semua ini, tentu saya akan sangat berterima kasih terhadap :

1. Allah SWT. Karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berproses dan berkembang di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini.
2. Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengizinkan saya untuk terus bersholawat sehingga mendapatkan barokah beliau yang tiada terbatas.
3. Kedua Orang Tua, tentunya karena mereka lah alasan saya berada dititik ini, terima kasih sudah mejadi motivator, donatur, inspirator dan juga alasan kenapa saya harus lanjut hidup. Mungkin setelah ini, kita bertukar tempat saja, insyaallah saya akan menggantikan tempat kalian sebagai tulang punggung keluarga. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada bapak Juso dan ibu Takiyah.
4. Kepada saudara saudara saya, kakak dan adik saya. Kerena juga semangat dari kalian yang menjadi inspirasi bagi saya untuk terus bisa menghadapi ujian dalam proses saya menuju kesuksesan.
5. Kapada kerabat dekat, keluarga besar, entah keluarga dari bapak dan juga ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya juga, terutama ke mbak Faiz yang sudah memeberi pinjam laptopnya saat pengerjaan skripsi saya.

6. Kepada guru dan para dosen yang dengan senantiasa menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada saya sehingga saya bisa menjadi orang yang berpendidikan, berakhlak, tentunya juga beradab.
7. Kepada teman teman sepermainan, teman kontrakan, teman organisasi, teman kelas AKS1 FEBI, Teman Teman akuntansi Syariah 21, khususnya kepada Farid, Zaeni, Roni, serta Tentunya Kepada Ustadzah Fitroh dan khususnya kepada TIMNAS (Tim Nasek) saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Kini bukanlah akhir untuk kita semua, namun ini adalah awal mula perjalanan kita menuju ruang yang lebih luas untuk berproses lebih banyak lagi.
8. Kepada jodoh saya yang masih belum ditemukan keberadaannya, terima kasih sudah menunggu selama ini, terima kasih juga karena anda sudah menjadi alasan saya untuk tidak menyerah sebab masih harus jalan terus untuk terus mencarimu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Khoirul Umam, Denari Dhahana Edtiyarsih, 2025 : *Analisis Peran Audit Internal dalam Mengoptimalkan Penerapan Prinsip Good Governance dengan Perspektif Islam di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Jember*

Kata Kunci : Audit Internal, *Good Governance*, Perspektif Islam, PPID Jember, Transparansi, Akuntabilitas

Latar belakang penelitian ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kecurangan di Indonesia dan pentingnya audit internal sebagai mekanisme pengawasan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai Lembaga pemerintah, bukan tidak mungkin PPID sebagai instansi pemerintah tidak menerapkan prinsip dari tata kelola yang baik, tata kelola yang baik merupakan kerangka kerja yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan organisasi, maka disini *Internal audit* memiliki peran sebagai mekanisme agen kontrol yang bersifat independen yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan integritas operasional terhadap regulasi

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana peran *internal audit* pada mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance* di PPID Jember, 2). Bagaimana peran *internal audit* pada mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance* di PPID Jember menurut pandangan islam.

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk Mengidentifikasi peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* di PPID Jember, 2). Untuk Mendeskripsikan peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* di PPID Jember menurut pandangan islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. audit internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PPID Jember melalui pengawasan, peninjauan sistem pengendalian internal, dan rekomendasi berdasarkan risiko. 2. Dalam perspektif Islam, audit internal juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang tercermin dalam pelaksanaan fungsi-fungsi PPID Kabupaten Jember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran audit internal yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi pemerintah. Rekomendasi yang diberikan kepada PPID Jember adalah peningkatan kapasitas auditor.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A. selaku Dosen Pembimbing

Skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dengan memberikan arahan positif kepada penulis, motivasi, semangat, dan yang selalu sabar ketika menghadapi keluh kesah penulis selama ini, yang selalu memberikan penulis saran, masukan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E. M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan persetujuan dan kemudahan terhadap proses skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pelayanan yang terbaik selama ini.
8. Pihak PPID dan Rekan Pemkab, karena sudah bersedia mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi di tempat tersebut, serta bantuannya juga karena telah membantu mengeksplor data dari instansi tersebut.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung
10. Tim penguji skripsi.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak

kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

demi perbaikan ke depan. Semoga tulisan ini bermanfaat, khususnya bagi

penulis. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Mei 2025

Tim Penulis

Khoirul Umam
211105030019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB II.....	17
KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	31
1. Audit Internal	31
2. <i>Good Governance</i>	37
3. Perspektif Islam	42
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49

C. Subyek Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV	58
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	85
BAB V.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Daftar Kasus yang pernah terjadi di Indonesia.....	1
2.1	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	17
2.2	Ruang Lingkup Audit Internal.....	36
2.3	Indikator keefektifan Audit internal.....	37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi PPID.....	49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak empat tahun terakhir telah marak terjadinya fraud di tanah Indonesia, tepatnya pada tahun antara 2021- 2023. Dan hal tersebut telah membuat negara Indonesia rugi sebesar 123, 51 Triliun Rupiah. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh menteri keuangan indonesia ibu sri mulyani, antara lain kasus yang terjadi di indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kasus yang pernah terjadi di Indonesia

No	Nama kasus	Banyaknya kasus
1.	Investasi bodong	97 kasus
2.	Pinjaman online ilegal	619 kasus
3.	Gadai ilegal	62 kasus

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan

<https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>

Tidak hanya itu, Indonesia berada di ranking ke 4 perihal jumlah *fraud* pada tahun 2022, dengan 23 kasus, menurut publikasi Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang berjudul *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. Tiga kecurangan terbesar di Indonesia adalah kecurangan laporan keuangan

(6,7%), korupsi (64%), dan eksploitasi aset negara dan perusahaan (28,9%). Mataram (NTB Suara): Dugaan pembobolan dana nasabah sebesar Rp11,9 miliar di Bank NTB Syariah dilakukan secara “rapi”. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan, sejumlah transaksi janggal tidak terjangkau sistem audit internal. Tidak heran, modus ini berlangsung selama delapan tahun. "Makanya auditornya juga kita periksa. Bagaimana uang sebanyak ini bisa tidak kelihatan," kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Rabu, 22 September. Saksi auditor internal dari Bank NTB Syariah telah dimintai keterangan. Baru pada tahun 2020, kegagalan transaksi ini teridentifikasi. Meskipun pembobolan ini diduga sudah terjadi sejak tahun 2012, “Hasil pemeriksaan internal bersih. Tidak ditemukan pada saat itu,” lanjutnya. Kasus ini telah ditingkatkan ke tingkat investigasi kejahatan perbankan. Mengalihkan transaksi keuangan nasabah ke rekening pribadi merupakan salah satu modus yang ditemukan. Terlapor dalam kasus ini adalah seorang karyawan berinisial PS yang bekerja sebagai penyedia layanan cashless selama delapan tahun. Polda NTB juga mendorong pihak-pihak lain untuk terlibat. PS yang dimaksud adalah penyedia jasa yang membawahi anggota staf. Pada tahap penyelidikan ini, 18 orang saksi telah dimintai keterangan. Pada tahap penyidikan, para saksi ini akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan. Menurut temuan awal, 440 transaksi nasabah ditimbang selama periode delapan tahun.

Transaksi nasabah dialihkan ke tiga rekening pribadi, yang berfungsi sebagai wadah, untuk melakukan pembobotan. Setoran tunai dan transfer rekening termasuk di antara transaksi yang dikompromikan.²

Dalam era yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, audit internal memberikan bantuan terhadap lembaga pemerintah perihal mendeteksi dan metata kelola risiko yang dapat mengancam terhadap rencana mencapai visi misi yang strategis. Dengan pendekatan berbasis risiko, auditor internal dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memberikan langkah mitigasi yang tepat. Ini memungkinkan PPID Jember untuk lebih proaktif dalam menghadapi tantangan. Audit internal juga berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pemantauan yang ketat, PPID Jember dapat menghindari sanksi hukum serta menjaga reputasinya sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab.³

Sebagai Lembaga pemerintah, bukan tidak mungkin PPID sebagai instansi pemerintah tidak menerapkan prinsip dari tata kelola yang baik, tata kelola yang baik merupakan kerangka kerja yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan organisasi. Di Indonesia, penerapan prinsip *Good Governance* semakin diutamakan untuk meningkatkan kepercayaan

² <https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>

³ <https://crmsindonesia.org/publications/pentingnya-audit-internal-dalam-meningkatkan-tata-kelola-organisasi/>

publik dan efektivitas operasional lembaga pemerintah serta swasta. Dalam konteks ini, audit internal berfungsi sebagai alat pengawasan yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara melakukan evaluasi dan mengoptimalkan Efisiensi pengendalian risiko serta kontrol internal. Di era informasi saat ini, transparansi dan akuntabilitas publik menjadi dua pilar penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Jember berperan strategis perihal memastikan keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat. Tugas utama PPID adalah menyediakan, mengendalikan, dan mendokumentasikan informasi publik yang dapat diakses oleh publik luas, sehingga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Transparansi informasi publik di PPID Jember telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa meskipun PPID telah berupaya untuk menyajikan informasi secara terbuka, masih ada kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan keterbatasan teknologi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inisiatif untuk meningkatkan transparansi sudah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif.⁴

⁴ <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/4677>

Luluk Musfiroh juga menyatakan dalam artikel penelitiannya bahwasanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan modal intelektual berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Pimpinan berdaulat dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *value* perusahaan.⁵ Nurul Widya juga menyatakan dalam penelitiannya bahwasanya lingkungan internal harus dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan.⁶ Fauzan dalam bukunya juga menyatakan bahwasanya sistem kontrol memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi karena memastikan bahwa setiap bagian dari kegiatan organisasi mengikuti rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Begitupun yang dikatakan oleh Nur Ika Mauliyah, sistem tata kelola perusahaan ini sangat penting bagi bisnis karena memastikan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan berdasarkan kerangka kerja legislatif dan mendukung kinerja perusahaan dengan memantau atau membimbing kinerja manajemen.⁸ Denari Dhahana Edtiyarsih juga menyatakan dalam Jurnalnya, yakni Penanganan risiko dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Strategi penanganan ini disusun berdasarkan tingkat risiko yang telah

⁵ Luluk Musfiroh, et al, *Corporate Governance, Intellectual Capital, Financial Performance dan Firm Value* pada Perusahaan Farmasi di BEI, *Journal manajemen dan Bisnis*, 2021, hal 14-25

⁶ Nurul Widyawati Islami Rahayu, Tata Kelola Pelayanan yang baik dengan menggunakan banyak lembaga dalam Pengelolaan Zakat, Vol 4, *IJMAS*, 2023, 16-28

⁷ Dr.H.Fauzan, *Sisitem Pengendalian Internal* (Tangerang:Indigo Media,2024) Hal 77

⁸ Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang, Vol 1, *JEBMAK*, 2022, 9-16

dievaluasi, dengan fokus utama pada risiko tinggi dan sangat tinggi, serta mempertimbangkan risiko sedang (medium) yang berpotensi meningkat.⁹

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip *Good Governance* sejalan dengan ajaran etika dan moral yang terkandung dalam syariat. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana audit internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol tetapi juga sebagai pendorong nilai-nilai etika dalam pengelolaan informasi publik di PPID Jember. Dengan demikian, audit internal dapat berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang tidak hanya efisien tetapi juga beretika. Dalam Islam, audit internal dapat dipahami melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah, yang menekankan pada perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan kerugian (mencegah kemafsadatan). Audit internal diharapkan tidak hanya

berfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada penerapan esensi etika syariah seperti kejujuran, *accountability*, dan *profesionality*. Penerapan *internal audit* dalam perspektif Islam di PPID Jember sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi daripada penerapan prinsip *Good Governance*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik audit, instansi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan

⁹ Denari Dhahana Edtiyarsih, et al, Penerapan Manajemen Risiko Dalam Keuangan Proyek Sumber Daya Air Di Era Perubahan Iklim: Studi kasus Bendung Tugusari, Vol 1, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 2025, 320-330

publik. Penelitian ini diharap bisa mempublikasikan wawasan terhadap pengambil kebijakan perihal manajemen strategi audit yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta mendukung tercapainya tujuan organisasi.¹⁰

Internal audit memiliki peran sebagai mekanisme agen kontrol yang bersifat independen yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan integritas operasional terhadap regulasi. Dalam konteks *Good Governance*, *internal audit* bukan hanya berperan sebagai detektor masalah, tetapi juga sebagai pencegah dan penyedia solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sebuah organisasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana audit internal dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* di PPID Jember. Penerapan *Good Governance* yang baik di lembaga publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menganalisis peranan audit internal di

PPID Jember, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengawasan yang efektif dapat memperbaiki kinerja lembaga publik dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

Salah satu pilar utama yang akan mendukung terciptanya lingkungan yang transparan dan memaksimalkan efektivitas PPID Kabupaten Jember sebagai badan publik adalah keterbukaan informasi. Karena penerapan UU KIP merupakan perubahan yang signifikan

¹⁰ Fita Setiati, Menelisik Spirit Profetik Konsep Audit Internal dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, vol.1, PERADABAN JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS, 2022, 36-46

dalam cara masyarakat, negara, dan negara beroperasi, maka setiap orang di negara ini perlu menyadari bahwa semua badan dan lembaga pemerintah yang menangani informasi harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui evaluasi berkala, audit internal dapat membantu PPID Jember dalam meningkatkan efisiensi operasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit bukan hanya berfokus terhadap kepatuhan, akan tetapi juga terhadap pengoptimalan prosedur serta penggunaan sumber daya. Informasi yang diperoleh dari proses audit internal memberikan dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Data akurat dan analisis mendalam dari auditor internal membantu pimpinan PPID Jember merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan respon pada keperluan khalayak umum.¹¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyun Syafithri, dkk, menjelaskan bahwa Manajemen puncak dapat memperoleh manfaat

dari keahlian fungsional auditor internal dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.¹² Pernyataan ini juga diperkuat oleh Afi Masrurroh, dkk

dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur) juga menjelaskan

bahwa audit internal mempunyai fungsi yang sangat efektif terhadap

¹¹ <https://bpkp.go.id/id/berita/VaPe/bpkp-tegaskan-peran-strategis-auditor-internal-dalam-tata-kelola-publik-pada-konferensi-regional-aciia-di-bali>

¹² Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, et al, "Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: *Systematic Literature Review*", vol 9, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 2025, 512-528

manajemen dan mencegah korupsi. Salah satu alat penting dan efisien untuk menemukan risiko dan celah korupsi di perusahaan adalah audit internal. Studi ini menyelidiki cara-cara di mana prosedur audit internal, seperti penilaian kepatuhan, penelusuran transaksi, dan penerapan pengendalian internal, bisa berhasil mengurangi kesempatan korupsi.¹³ Temuan memperlihatkan bahwa *internal audit* wajib mempunyai pengaruh penghambat pada finansialisasi perusahaan. Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa *system* audit internal wajib mempunyai pengaruh penghambat yang lebih signifikan terhadap tingkat finansialisasi perusahaan non-BUMN, perusahaan di wilayah timur, dan perusahaan di wilayah dengan regulasi keuangan yang lebih lemah (Qianqian Chen, Zhi Chen, 2024).¹⁴

Meskipun peran audit internal sangat penting, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh PPID Jember dalam implementasinya. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya

pelatihan bagi auditor internal, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi dapat menghambat efektivitas audit internal. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari semua aspek dalam memperkuat peran audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* di PPID Jember. melalui penelitian ini, diharapkan bisa menyalurkan wawasan yang aktual mengenai fungsi *internal audit* dalam

¹³ Afi Masruroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, "Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)", vol 9, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2024, 49-56

¹⁴ Qianqian Chen, Zhi Chen, "Mandatory internal control audit and corporate financialization", vol62, *Finance Research Letters*, 2024

meningkatkan kinerja PPID Jember serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan praktik transparansi dan akuntabilitas di masa depan.

Oleh sebab itu peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Peran Audit Internal Dalam mengoptimalkan Penerapan Prinsip *Good Governance* ditinjau dari perspektif islam di PPID Jember”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang mungkin sudah cukup kompleks dan lengkap dari keterangan konteks penelitian yang diambil, maka peneliti mengangkat suatu permasalahan yang esensi nya cukup mendominasi pada *research* kali ini, yakni

1. Bagaimana peran *internal audit* pada mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance* di PPID Jember?
2. Bagaimana peran *internal audit* pada mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance* menurut Pandangan Islam di PPID Jember?

C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan yang menjadi fokus pada *research* diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian yaitu Untuk Mengidentifikasi peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* di PPID Jember. Serta untuk menegetahui bagaimana jika hal tersebut ditarik dalam perspektif islam.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang akan didistribusikan sesudah penelitian selesai termasuk dalam manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti, institusi, dan masyarakat luas merupakan contoh manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian harus masuk akal. Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat pada beberapa pemangku kepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan perspektif islam, dan juga penelitian ini membantu untuk mengidentifikasi peran audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance*. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori tentang bagaimana peranan audit internal mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance* dengan pendapat syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti/Akademisi

Dengan melakukan penelitian yang sekarang, peneliti juga bisa belajar langsung bagaimana penerapan dari Audit internal tersebut. Sehingga dengan pengalaman belajar tersebut bisa juga menambah wawasan terhadap teori yang mereka dapatkan dalam bangku perkuliahan. Bagi Regulasi Dan Kebijakan

b. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi terhadap system dan juga kebijakan yang sedang berjalan mengenai peranan sekaligus implementasi dari Audit internal itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan sangat membantu terhadap masyarakat umum, dikarenakan pada instansi yang digunakan sebagai objek sekarang juga berupa lembaga pemerintah yang di khususkan kepada masyarakat umum.

E. Definisi Istilah

Pemahaman terhadap istilah-istilah kunci yang menjadi titik fokus peneliti dalam judul penelitian dicantumkan dalam definisi

istilah. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.

1. Audit Internal

Audit internal adalah proses evaluasi yang bersifat sistematis dan independen yang diterapkan oleh unit audit pada suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengendalian internal, kelola risiko, dan tata kelola. Tujuan utama dari audit internal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan berfungsi

sesuai dengan kebijakan, proses, dan hukum yang relevan serta memberikan saran untuk peningkatan bila diperlukan.¹⁵

2. Pengoptimalan

Pengoptimalan atau mengoptimalkan adalah proses untuk membuat sesuatu menjadi seefisien atau seefektif mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Tujuan dari pengoptimalan adalah untuk mencapai hasil terbaik dalam suatu sistem, situasi, atau proses dengan cara meminimalkan kelemahan, mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan, dan memaksimalkan hasil yang diinginkan.

3. *Good Governance*

Good Governance adalah Sebuah sistem dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi yang maksimal dengan metode yang tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

Good Governance Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya

organisasi. Audit internal berkontribusi pada penerapan *Good*

Governance dengan memastikan bahwa praktik manajerial dilakukan secara etis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Good Governance biasanya juga merujuk pada *system* yang digunakan untuk memberikan arahan dan mengelola organisasi. Ini mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang memberikan

¹⁵ Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

kepastian bahwa lembaga pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum serta regulasi yang sudah diberlakukan. Dalam konteks audit internal, tata kelola mencakup pengawasan terhadap kepatuhan pada kebijakan dan tata aturan yang ditetapkan oleh pengelola manajemen.¹⁶

4. Perspektif Islam

Perspektif Islam adalah cara pandang yang berlandaskan di ajaran nilai-nilai agama Islam, meliputi akan aneka macam aspek dari kehidupan insan, baik spiritual, sosial, maupun material.

5. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Lembaga ini merupakan pejabat yang ditunjuk sang pemerintah buat mengelola info serta dokumentasi publik. Tugas PPID mencakup penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan info publik agar bisa diakses oleh rakyat. PPID pula bertanggung jawab buat menyampaikan kepastian bahwa isu yang diberikan adalah

seksama, tepat ketika, serta sejalan menggunakan ketentuan yg telah diberlakukan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sesuai dengan materi yang akan dibahas, sistematis pembahasan kepenulisan merupakan kerangka konsep sekaligus rancangan pembahasan dari isi Skripsi yang mencoba untuk

¹⁶ Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, et al, 2024, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Vol 1, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 1-5.
<http://eprints.polsri.ac.id/8979/3/3.%20BAB%20II.pdf>

memahami segala sesuatu dari semua pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya, skripsi ini terdiri atas V(lima) bab, yang masing-masing bab memiliki sub-bab, yang satu sama lain saling berkaitan dan memperdalam pemahaman kita terhadap bab sebelumnya.:

BAB I : Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian; fokus masalah menjelaskan pentingnya riset ; tujuan dan manfaat riset ; definisi istilah; dan metodologi yang akan dibahas.

BAB II : Menjabarkan beberapa penelitian terdahulu dan studi teoritis disertakan dalam bagian tinjauan pustaka. Berbagai *research gap* yang terkait dengan riset yang akan diuraikan dalam bagian ini. Dalam tinjauan teoritis, teori apa saja yang menjadi dasar penelitian dikaji.

BAB III : Menjabarkan mengenai pendekatan riset yang dipakai peneliti, termasuk jenis dan metodologi riset, daerah, partisipan, teknik eksplor data, validitas, serta tahapan-tahapannya.

BAB IV : Menggabungkan temuan-temuan penelitian lapangan. Bagian ini mencakup sasaran riset, penyampaian data, uraian data, dan penjabaran temuan.

BAB V : Menjabarkan pembahasan akhir yang berupa kesimpulan dari studi teoretis dan penelitian, yang mencakup kesimpulan, rekomendasi, ringkasan temuan, dan

penjelasan mengenai signifikansi penelitian, diakhiri dengan pernyataan penutup, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini, peneliti menyajikan beberapa output dari *research gap*, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, dari jurnal nasional maupun internasional yang signifikan pada riset yang akan dilaksanakan nantinya. Rangkuman dari riset tersebut disusun untuk menunjukkan tingkat orisinalitas dan posisi penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan acuan terkait Audit Internal disampaikan di bawah ini:

1. Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, dkk, 2025, “Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: *Systematic Literature Review*”

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan Pustaka yang sistematis, yaitu pendekatan terstruktur untuk menelaah literatur

ilmiah guna membangun pemahaman, melakukan refleksi kritis, serta merumuskan arah penelitian selanjutnya. Pedoman yang dibuat oleh Kitchenham et al. dikutip dalam penelitian ini. Sesuai dengan standar tersebut, peneliti menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan kata kunci efektivitas audit internal dan menggunakan database elektronik terkemuka, termasuk Emerald, Science Direct, MDPI, Pro Quest, Google Scholar, dan Semantic Scholar. Salah satu aset strategis yang membantu manajemen

puncak menerapkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko secara efektif adalah kompetensi fungsional auditor internal. IIA menyatakan bahwa karakteristik organisasi dan hubungan, sumber daya dan kompetensi tim audit, serta metode dan aktivitas audit, semuanya mempengaruhi seberapa efektif audit internal. Hal ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya peran audit internal dalam membantu organisasi merespons tantangan ekonomi global yang terus berkembang.¹⁷

2. Berwin Anggara, Siti Septi Ariani, 2025, “Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan *Fraud* di Institusi Pemerintahan”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan fenomena melalui data angka yang dianalisis secara statistik, termasuk statistik deskriptif seperti modus, mean, dan median. Metode ini menggunakan survei dengan kuesioner

sebagai alat utama pengumpulan data. Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang terukur dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas audit internal serta faktor-faktor penentu keberhasilannya, yaitu independensi, pengendalian internal, profesionalisme, dan kompetensi, oleh Inspektorat Kota Metro dalam upaya pencegahan fraud di lingkungan Pemerintah Kota

¹⁷ Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, et al, “Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: Systematic Literature Review”, vol 9, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 2025, 512-528

Metro. Studi kuantitatif ini melibatkan 31 perespon. Eksplorasi data dilakukan melalui sebarluasan kuesioner kepada Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang telah bekerja di Inspektorat Kota Metro selama lebih dari satu tahun. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26.¹⁸

3. Huda Sukmawan, Machmudin Eka Prasetya, 2025, “Evaluasi Peran Audit Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah metode untuk menyelidiki dan memahami interpretasi yang dibuat oleh orang atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Krippendorff

menjelaskan bahwa pendekatan analisis studi ini - analisis isi - memungkinkan temuan penelitian untuk dipahami dengan menguraikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh dokumen-dokumen yang relevan. Dari hasil penelitian ini, Inspektorat Jenderal dapat memperkuat perannya dengan memperluas pengawasan, tidak hanya terbatas pada kantor pusat. Dengan jumlah auditor internal Inspektorat Jenderal yang terbatas

¹⁸ Berwin Anggara, Siti Septi Ariani, “Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan Fraud di Institusi Pemerintahan”, vol 5, Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi, 2025, 1418-1435

dan adanya instansi Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia, sinergi dapat dilakukan dengan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR). Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga dapat bekerja sama dengan UKMR sebagai lini kedua untuk menilai kepatuhan manajemen terhadap penerapan manajemen risiko.¹⁹

4. Ricky, 2024, “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud Dalam Laporan Keuangan”

Melalui tinjauan literatur, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki bagaimana audit internal dan pengendalian internal mempengaruhi identifikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Dua alat penting untuk mengidentifikasi dan menghentikan kecurangan adalah audit internal dan kontrol internal, namun budaya perusahaan dan pengaruh dari luar sering kali berdampak pada seberapa efektif sistem-sistem ini. Pengendalian internal

yang kuat dan audit internal yang independen bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pendeteksian kecurangan, menurut studi penelitian tersebut.²⁰

5. Afi Masuroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, 2024
“Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)”

¹⁹ Huda Sukmawan, Machmudin Eka Prasetya, “Evaluasi Peran Audit Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)”, vol 9, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 2025, 262-274

²⁰ Ricky, “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud Dalam Laporan Keuangan”, vol 7, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024, 18687-18691

Hubungan antara teori dan faktor-faktor terkait dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber buku dan jurnal yang dapat diakses baik secara offline maupun online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa penting audit internal dalam memerangi korupsi. Salah satu alat yang paling penting untuk menemukan risiko korupsi dan kelemahan dalam bisnis adalah audit internal. Studi ini melihat bagaimana teknik audit internal, seperti memantau transaksi, mengevaluasi kepatuhan, dan menerapkan pengendalian internal, dapat berhasil menurunkan risiko korupsi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan hipotesis tentang pengaruh variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang tinggi meningkatkan korupsi, sementara audit internal tidak efektif mencegahnya.²¹

6. Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, dkk, 2024, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo"

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui tulisan, ucapan, atau pengamatan terhadap perilaku

²¹ Afi Masruroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, "Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)", vol 9, Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2024, 49-56

individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif yang telah disesuaikan dengan situasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* sudah diimplementasikan dengan baik di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Akuntabilitas tercermin dari karakter pegawai yang bertanggung jawab, profesional, cermat, teliti, dan berintegritas tinggi. Prinsip dari transparansi terlihat melalui pelayanan yang jujur, objektif, dan tulus, meskipun pembaruan informasi di website masih perlu ditingkatkan.²²

7. Yuni Sukandani, Dessy Dwi Marta, dkk, 2024, "Peran Audit Internal dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)"

Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran rinci tentang kejadian yang mereka lihat. Ulasan, gagasan, dan ringkasan dari berbagai sumber, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan materi terkait dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian, dianalisis untuk melengkapi tinjauan pustaka.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran audit internal dalam mencegah kecurangan akuntansi di perusahaan. Tinjauan

²² Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, et al, 2024, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Vol 1, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 1-5.

literatur adalah alat pilihan untuk pendekatan kualitatif ini. Untuk memberikan pencerahan pada masalah penelitian, data sekunder dianalisis. Berdasarkan temuan tersebut, auditor internal dapat menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan melalui analisis dan pengujian. Auditor internal bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh rencana dan aktivitas perusahaan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memahami secara menyeluruh ruang lingkup pengendalian internal yang diterapkan.²³

8. Yanchun Xia, Huan Zhang, Shijun Guo, 2024, “*Mandatory internal control audits and management earnings forecast*”

Penelitian ini menguji bagaimana perubahan dalam audit pengendalian internal wajib (MICA) mempengaruhi akurasi perkiraan laba manajemen. Dengan menggunakan pengenalan MICAs secara bertahap di Cina sebagai guncangan eksogen, kami

menemukan penurunan yang signifikan dalam kesalahan ramalan laba manajemen setelah pengenalan MICAs. Selain itu, kami menemukan bahwa pengenalan MICA membantu mengurangi kesalahan perkiraan laba manajemen dengan meningkatkan efektivitas pelaporan pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kami juga menemukan bahwa keinformatifan perkiraan laba manajemen meningkat setelah

²³ Yuni Sukandani, Dessy Dwi Marta, et al, “Peran Audit Internal dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud)”, vol 2, Jurnal Inovasi dan Tren, 2024, 522-526

pengenalan MICA. Secara kolektif, hasil penelitian kami menyoroti peran penting MICA di pasar modal dan memiliki implikasi untuk yurisdiksi di mana MICA telah dilakukan atau sedang dipertimbangkan untuk diimplementasikan.²⁴

9. Qianqian Chen, Zhi Chen, 2024, “*Mandatory internal control audit and corporate financialization*”

Dalam penelitian ini secara empiris menguji dampak dari sistem audit pengendalian internal wajib terhadap finansialisasi perusahaan berdasarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di saham A China dari tahun 2007 hingga 2021 dengan menggunakan model perbedaan-perbedaan untuk analisis empiris. Temuan menunjukkan bahwa audit pengendalian internal wajib memiliki efek penghambatan terhadap finansialisasi perusahaan. Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa sistem audit pengendalian internal wajib memiliki efek penghambatan yang lebih signifikan terhadap tingkat finansialisasi perusahaan non-BUMN, perusahaan di wilayah timur, dan perusahaan di wilayah dengan regulasi keuangan yang lebih lemah.²⁵

10. Sylvie Chevrier, Elise Goiseau, dkk, 2023, “*Managing mentoring for the labor market integration of humanitarian migrants*”

²⁴ Yanchun Xia, Huan Zhang, Shijun Guo, “*Mandatory internal control audits and management earnings forecast*”, vol 85, *Pacific-Basin Finance Journal*, 2024

²⁵ Qianqian Chen, Zhi Chen, “*Mandatory internal control audit and corporate financialization*”, vol 62, *Finance Research Letters*, 2024

Penelitian ini mengkaji desain dan tantangan operasional dalam mengelola program pendampingan yang mendukung integrasi pasar tenaga kerja bagi para migran kemanusiaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi partisipan yang diperluas terhadap kegiatan dan proses organisasi, analisis dokumen dan komunikasi yang berorientasi internal dan eksternal, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan program di sebuah organisasi Prancis yang bekerja dengan para migran kemanusiaan yang baru saja tiba. Dengan menggunakan wawasan teoritis dari pendekatan penciptaan nilai, makalah ini mengidentifikasi bagaimana organisasi berusaha membangun proposisi nilai, termasuk bagaimana hal ini tertanam dalam desain program dan keterlibatan para aktor. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara kritis bagaimana hal tersebut ditafsirkan, diberlakukan, dan terkadang ditumbangkan melalui persepsi dan tindakan berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini mengevaluasi bagaimana ruang lingkup, tujuan dan dampak yang dibayangkan oleh organisasi diterjemahkan ke dalam pengalaman peserta, yang berpotensi membentuk hasil program. Temuan penelitian ini menekankan implikasi dari spesialisasi program dan tata kelola yang terdistribusi terhadap pengelolaan skema pendampingan yang

efektif yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi pekerja migran ke dunia kerja.²⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, dkk (2025)	Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: <i>Systematic Literature Review</i>	Diantara kedua penelitian ini sama-sama mengkaji perihal bagaimana caranya menerapkan audit internal.	Terdapat ketidaksamaan pada kedua penelitian ini, yakni metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan studi pustaka artinya sumber referensi yang digunakan berupa buku-buku, sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif artinya terjun langsung ke lapangan (observasi).
2.	Berwin Anggara, Siti Septi Ariani (2025)	Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan <i>Fraud</i> di Institusi Pemerintahan	Pada kedua penelitian ini sama-sama menggunakan audit internal sebagai subjek dalam penelitian ini.	Pada penelitian sebelumnya variabel bebasnya menggunakan mitigasi tindakan fraud, sedangkan

²⁶ Sylvie Chevrier, Elise Goiseau, et al, 2023, "Managing mentoring for the labor market integration of humanitarian migrants ", vol 2, Journal of management, 2023, 1-10

			Dan juga menempatkan audit internal sebagai variabel utama dalam mewujudkan dan meningkatkan efektivitas dalam tujuan lembaga instansi.	pada penelitian sekarang menggunakan GCG dalam perspektif islam sebagai variabel bebas.
3.	Huda Sukmawan, Machmudin Eka Prasetya (2025)	Evaluasi Peran Audit Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas tentang penerapan Audit Internal dan metode penelitian yang digunakan.	Pada penelitian ini variable pembantu atau variable yang digunakan adalah menggunakan kata Analisis dalam mewujudkan GCG, sedangkan penelitian yang terdahulu lebih menekankan kepada evaluasi terhadap apa yang sudah berlaku.

4.	Ricky (2024)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud Dalam Laporan Keuangan	Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan juga menganalisis bagaimana penerapan Audit internal dalam suatu lembaga untuk menguji ke efektif annya.	Penelitian ini pada peneltian yang sekarang lebih menekankan kepada objek penelitian, yaitu penelitian tertuju pada kinerja keuangan dari lembaga itu sendiri dan variable yang digunakan. Dan juga metode yang digunakan berbeda.
5.	Afi Masrurah, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi (2024)	Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)	Pada kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana caranya menerapkan Audit Internal dalam dalam suatu badan lembaga.	Meskipun ada kesamaan dari kedua penelitian ini pada variabel yuang digunakan, tapi metode yang digunakan berbeda.
6.	Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, dkk, (2024)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo	Perbandingan pada penelitian kali ini merujuk pada persamaan subjek yang digunakan adalah <i>Good Governance</i> sebagai variable utama dan juga	Tapi meskipun sama dalam penggunaan variabel, akan tetapi pada penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan terhadap objek dari penelitian

			metode yang digunakan.	tersebut.
7.	Yuni Sukandani, Dessy Dwi Marta, dkk (2024)	Peran Audit Internal dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud)	Pada kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana caranya menerapkan audit internal dalam mendukung tujuan suatu lembaga instansi.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada metode yang dilakukan, jika pada penelitian yang sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menenknakan kepada fenomena yang diangkat, maka pada penelitian yang sekarang menggunakan kualitatif pada intansi, yakni observasi langsung ke lapangan.
8.	Yanchun Xia, Huan Zhang, Shijun Guo (2024)	<i>Mandatory internal control audits and management earnings forecast</i>	Pada kedua penelitian kali ini memiliki titik persamaan pada pembahasan yang akan diterangkan, yaitu sama-sama menjelaskan konsep pada audit intenal.	Meskipun ada persamaan dari kedua penelitian ini, akan tetapi juga terdapat perbedaan yaitu pada metode yang digunakan, jika pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, maka pada penelitian yang sekarang menggunakan

				metode kaulitatif.
9.	Qianqian Chen, Zhi Chen (2024)	<i>Mandatory internal control audit and corporate financialization</i>	Pada kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu di metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah kaulitatif.	Meskipun metode yang diambil itu sama, akan tetapi juga ada perbedaan pada kedua penelitian tersebut yaitu variabel independen nya, jika pada penelitian sekarang menggunakan istilah audit internal sebagai variabel independen, maka pada penelitian sebelumnya menggunakan tata kelola sebagai variabel independen.
10.	Sylvie Chevrier, Elise Goiseau, dkk, 2023	<i>Managing mentoring for the labor market integration of humanitarian migrants</i>	Persamaan dari dua penelitian ini berupa metode yang digunakan yaitu kaulitatif.	Perbedaan nya adalah pada penelitian sekarang menggunakan audit internal sebagai subjek utama dan GCG sebagai variabel dependen

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2025

B. Kajian Teori

1. Audit Internal

a. Pengertian Audit Internal

Menurut Mulyadi audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan, sebagai bentuk layanan kepada manajemen.²⁷ Pendapat ini di dukung oleh pernyataan dari salah seorang ahli yakni Agoes Sukrisno, yaitu Audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, serta untuk mengetahui apakah pengendalian internal telah berjalan secara efektif.²⁸ Kedua pendapat para Ahli tersebut di perkuat oleh

Insititut Of Internal Auditor yang pernyataannya *“An independent, impartial assurance and consulting activity, internal auditing aims to enhance and optimize an organization's operations. By providing a methodical, disciplined way to assess and enhance the efficacy of risk management, control, and governance procedures, it assists a company in achieving its goals.”*, “Sebagai aktivitas asurans dan konsultasi yang independen dan tidak memihak, audit

²⁷ Mulyadi. (2018). Auditing (Edisi Terbaru). Salemba Empat

²⁸ Agoes, S. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

internal bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan operasi organisasi. Dengan menyediakan cara yang metodis dan disiplin untuk menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan prosedur tata kelola, audit internal membantu perusahaan mencapai tujuannya.”²⁹

b. Ruang Lingkup Audit Internal

Menguji dan mengevaluasi efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal organisasi, serta kualitas pekerjaan yang dilakukan dalam memenuhi tugas yang telah ditetapkan, semuanya termasuk dalam ruang lingkup audit internal. Internal auditor meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ *Institute of Internal Auditors. (2020). The International Professional Practices Framework (IPPF).*

Tabel 1.3
Ruang Lingkup Audit Internal

No	Jenis Audit	Tujuan	Ruang Lingkup
1.	Audit Kinerja	Memberikan penilaian terhadap kepatuhan suatu organisasi.	Ke efektifitas kinerja dalam mencapai tujuan.
2.	Audit Kepatuhan	Memberikan penilaian terhadap keefisienan sumber daya yang telah digunakan.	Kepatuhan terhadap kebijakan internal pada organisasi, khususnya di PPID Jember.
3.	Audit Probitas	Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara objektif.	Identifikasi potensi masalah.

Sumber : Data tentang Jenis dan Ruang Lingkup Jenis Audit

Tujuan dari Audit internal adalah memberikan jaminan, nasihat, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada dewan direksi dan manajemen, Anda dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghasilkan, memelihara, dan mempertahankan nilai.³⁰

Audit internal adalah prosedur yang tidak memihak dan independen yang dilakukan oleh tim audit organisasi untuk mengevaluasi efisiensi kerangka kerja pengendalian internal. Tujuan utamanya adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pemberian saran terkait manajemen risiko, evaluasi kinerja, dan pengendalian manajemen.³¹

c. Audit Internal Yang Efektif

Untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, keberadaan departemen audit internal yang berjalan secara

³⁰ *Institute International Auditor (IIA)*, Standar Audit Internal Global, Lake Mary USA, 2024. Hal 15

³¹ https://mutucertification.com/tujuan-penerapan-audit-internal/?utm_source=chatgpt.com

optimal sangatlah penting. Beberapa hal perlu diperhatikan agar supaya perusahaan dapat membentuk departemen audit internal yang efektif.³²

Tabel 1.4
Indikator audit internal

Indikator	Penjelasan
Independensi	Departemen audit internal harus memiliki posisi yang independen dalam struktur organisasi perusahaan.
Support System	<i>Top management</i> harus memberikan dukungan penuh kepada departemen audit internal.
Integritas dan profesionalisme	Departemen audit internal harus terdiri dari tenaga profesional yang kapabel, objektif, serta memiliki integritas dan loyalitas tinggi.
<i>Character audit</i>	Internal audit departemen harus mempunyai internal audit <i>character</i>

Sumber : Data yang di eksplor oleh peneliti tentang Indikator Audit Internal

d. Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hery standar profesional audit internal terbagi atas empat macam diantaranya yaitu :³³

a) Independensi

Auditor internal harus bersifat mandiri dan terpisah dari aktivitas yang diaudit. Kemandirian tercapai ketika auditor dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Sikap ini penting agar penilaian yang diberikan tetap netral, yang hanya dapat dijaga melalui posisi organisasi yang tepat dan sikap objektif auditor internal.

³² Kusumawati, N. A. (2016). Peran Audit Internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Jurnal Riset Mahasiswa (JRMA) Volume: 04, Nomor: 01

³³ Hery. (2019). Auditing dan Assurance: Pendekatan Terpadu. Edisi 1. Jakarta: Grasindo.

b) Profesional

Auditor internal harus bekerja dengan keahlian dan ketelitian profesional. Setiap auditor wajib memiliki kemampuan profesional. Untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan dengan benar dan tepat, pimpinan audit internal harus menunjuk tim yang memiliki pengetahuan dan keahlian dari berbagai bidang, termasuk akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, teknologi informasi, perpajakan, dan hukum.

c) Lingkup pekerjaan

Lingkup audit internal terdiri dari penilaian atas efektivitas dan luasnya sistem pengendalian internal organisasi. Tujuannya adalah memastikan Sistem ini dapat memberikan tingkat jaminan yang adil bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif, murah, dan sesuai rencana.

e. Jenis-Jenis Audit Internal

Audit internal sendiri memiliki beberapa jenis, di antara lain.³⁴

- a) Audit Kepatuhan: Memberikan kepastian bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, baik internal dan juga eksternal. Audit ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan staf, dan observasi langsung.

³⁴ <https://mitraberdaya.id/id/news-information/jenis-audit-internal>

- b) Audit Kinerja: Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Auditor akan meninjau proses bisnis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- c) Probitas audit : proses audit yang dilakukan untuk menilai integritas, kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan, dan transparansi dalam kegiatan atau proyek tertentu, khususnya yang berisiko tinggi, seperti pengadaan barang/jasa pemerintah, kerja sama proyek besar, atau pengelolaan keuangan publik.
- f. Fungsi Audit internal

Berikut beberapa fungsi audit internal dalam organisasi:³⁵

- a) Memastikan bahwa operasional perusahaan mematuhi regulasi perundang-undangan dan ketetapan internal yang sudah ditetapkan.
- b) Mencegah dan mendeteksi adanya penipuan atau kecurangan di dalam organisasi melalui pengujian kontrol internal dan analisis data

- c) Meningkatkan tanggung jawab untuk pelaporan keuangan, hasil fisik, kegiatan, dan pencatatan.
- d) Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal organisasi dan langkah-langkah manajemen risiko.

³⁵ <https://crmsindonesia.org/publications/fungsi-manajemen-risiko-dan-internal-audit/>

- e) Mengidentifikasi kelemahan dalam proses bisnis dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

2. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Sedarmayanti menyatakan bahwa tata kelola yang baik menuntut komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Koordinasi, kejujuran, profesionalisme, serta etos kerja dan semangat kerja yang kuat merupakan hal yang diperlukan untuk tata kelola pemerintahan yang efektif. Aturan hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi adalah prinsip-prinsip utama yang disoroti. Menurut World Bank, *Good Governance* mencakup penghindaran korupsi baik di bidang politik maupun pemerintahan, serta manajemen pengembangan yang kuat serta bertanggung jawab. Selain itu, *Good Governance*

juga menekankan pada aturan keuangan serta penciptaan kerangka hukum yang kondusif bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Menurut

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance* adalah suatu jenis manajemen atau administrasi pembangunan yang mengutamakan peran pemerintah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip berikut: akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, daya tanggap, konsensus, keadilan, partisipasi, pengawasan, dan visi

strategis.³⁶ *Good Governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Gagasan ini sangat menekankan pada penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan cara yang bertanggung jawab yang melibatkan sektor publik, bisnis, dan pemerintah.³⁷

b. Prinsip *Good Governance*

Dalam sebuah instansi tentunya memiliki beberapa kebijakan yang diterapkan dalam perusahaannya, salah satunya tentunya adalah penerapan prinsip dari *Good Governance*, Menurut Mardiasmo dalam bukunya (Akuntabilitas Sektor Publik), terdapat beberapa prinsip utama *Good Governance*, yaitu:³⁸

a) Transparansi

Transparansi diartikan dengan Keterbukaan pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, dengan tetap berpegang teguh terhadap peraturan yang ditetapkan.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Kewajiban orang yang menerima kepercayaan (agen) untuk melaporkan kepada orang yang

³⁶ Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, et al, 2024, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Vol 1, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 1-5.
<http://eprints.polsri.ac.id/8979/3/3.%20BAB%20II.pdf>

³⁷ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

³⁸ Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Hal-124

memberikan kepercayaan (prinsipal), yang memiliki wewenang untuk meminta laporan, semua perilaku yang menjadi tanggung jawabnya.

c) Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menegaskan sesungguhnya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan ikut dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidupnya secara sama, tanpa diskriminasi. Kesetaraan juga berarti perlakuan yang adil bagi semua warga, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, agama, atau latar belakang lainnya.

d) Partisipasi

Semua aspek masyarakat harus diikutsertakan dalam tahap penentuan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang memiliki reputasi baik, sesuai

dengan konsep partisipasi. Mekanisme partisipatif ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

e) Supremasi Hukum

Prinsip ini berarti bahwa seluruh proses pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Hukum menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah.

c. Manfaat – Manfaat *Good Governance*³⁹

Sebagai dasar utama yang biasa dipegang dalam sebuah lembaga pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal mewujudkan tujuannya, tentunya *Good Governance* memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a) *Good Governance* mewajibkan pejabat dan lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran secara transparan.
- b) Pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghasilkan output yang sesuai dengan keperluan umum.
- c) Prinsip transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas membantu menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- d) Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

d. Ruang lingkup dan Tujuan *Good Governance*

Ruang lingkup *Good Governance* meliputi berbagai elemen dalam pengelolaan lembaga pemerintah, yang berfungsi sebagai panduan dan arahan bagi berbagai pihak, antara lain:⁴⁰

³⁹ Mardiasmo. (2009). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 115–125.

⁴⁰ UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.

a) Pemerintah publik

Meliputi: sistem birokrasi, pengambilan kebijakan, pelayanan publik, serta cara kerja daripada *check and balance* antar lembaga negara.

b) Hubungan antara masyarakat dan pemerintah

Menekankan adanya keterbukaan, partisipasi, dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara.

c) Penegakan hukum

Menekankan supremasi hukum, akses terhadap keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kelompok masyarakat.

d) Para pemangku kepentingan (stakeholders)

Keterlibatan sektor swasta, LSM, media, dan organisasi publik dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik.

Good Governance bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan

yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab dalam melayani kepentingan masyarakat luas. Sedangkan Menurut Mardiasmo, tujuan

dari *Good Governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan

nasional yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil yang mandiri untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.⁴¹

⁴¹ https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/4ef256af-ee67-43e8-a288-58059cb05c3f/content?utm_source=

3. Perspektif Islam

Perspektif Islam adalah cara pandang yang berlandaskan pada ajaran agama Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, maupun material. Berikut adalah pandangan Islam terhadap peran audit internal dalam lembaga organisasi :

1) Audit Internal Sebagai Amanah Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu prinsip dasar yang wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Amanah tidak hanya berarti menjaga titipan secara fisik, tetapi juga mengandung makna tanggung jawab moral atas segala bentuk pekerjaan dan keputusan yang diambil oleh seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."⁴²

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwasanya audit internal adalah bentuk tanggung jawab atas amanah organisasi.

Ketika seseorang diamanahi untuk melakukan pengawasan, maka berkhianat dalam hal ini (misalnya menyembunyikan penyimpangan) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

⁴² (QS. An-Nisa: 58)

*"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat."*⁴³

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang peranan yang sangat penting daripada audit internal dalam pandangan islam.

"Dari perspektif Islam, audit syariah sangat dibutuhkan untuk memenuhi maqāsid al-Shari'ah dan dengan demikian melindungi kekayaan orang, membuat transaksi adil dan transparan untuk klien, dan mencegah setiap transaksi atau transaksi yang tidak halal (diperbolehkan). Namun, perlu dicatat bahwa audit syariah bukanlah metode yang baru dibuat, seperti yang telah diterapkan sepanjang sejarah Islam dalam bentuk hisbah (pertanggungjawaban)."⁴⁴

Berdasarkan beberapa data diatas, dapat disimpulkan

bahwasanya Audit internal dalam perspektif Islam bukan hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga merupakan bentuk amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.

Dalam ajaran Islam, amanah tidak sekedar menjaga titipan secara fisik, namun mencakup integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Selain itu, audit internal di PPID Jember telah memainkan peran penting sebagai bentuk pelaksanaan

⁴³ HR. Bukhari dan Muslim

⁴⁴ Lubis et al., 2023, hal. 1036

amanah, terutama dalam pengawasan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan perubahan regulasi tetap ada, namun nilai-nilai Islam menjadi pedoman kuat untuk menjaga integritas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Dan juga ada beberapa prinsip utama *Good Governance* menurut pandangan Islam.⁴⁵

1) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam adalah kewajiban yang dibebankan kepada bisnis atau organisasi untuk menjawab kepada pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Tujuan utama akuntabilitas adalah melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban moral, sosial, dan agama yang menyertai pelaksanaan bisnis. Prinsip ini juga

sudah tertera pada kitab suci

Al-qur'an di surah Al-Baqarah Ayat 42, Allah Berfirman :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya."⁴⁶

Prinsip Akuntabilitas ini juga disinggung dalam sebuah hadits riwayat Bukhori No 893.

⁴⁵ Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabets

⁴⁶ QS, Al Baqarah, (2), : 42.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."⁴⁷

Tidak hanya di Al Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam pandangan islam, kalimat ini juga tercantum pada salah satu jurnal.

"Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam segala kegiatan ekonomi, terutama program kerja yang islam."⁴⁸

2) Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi dalam Islam sangat menekankan pada penyediaan informasi yang akurat, menyeluruh, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Menyediakan media untuk

menyampaikan pendapat, saran, dan kritik terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah. Prinsip

ini juga sudah tertera pada kitab suci

Al-qur'an di surah Al-Baqarah Ayat 282, Allah Berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

⁴⁷ HR. Bukhari no. 893 & Muslim no. 1829

⁴⁸ Elis Mediawati, 2018, hlm. 214

مَمَّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا نَسَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّيْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya di antara kamu dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Akan tetapi, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu merupakan muamalah yang kamu jalankan secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Janganlah penulis dan saksi-saksi itu dirugikan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah memberi pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁹

Hal ini juga diterangkan dalam hadits Muslim No.102, meskipun

tidak disebutkan secara eksplisit tentang transparansi, tapi nilai

⁴⁹ QS Al Baqarah, (2), : 282.

nilai yang terkandung di prinsip transparansi masih dijunjung tinggi.

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami."⁵⁰

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang prinsip Transparansi dalam pandangan islam.

"Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mendorong para pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan informasi pada semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam."⁵¹

3) Keadilan ('Adl)

Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam

pengelolaan bisnis. Keadilan berarti memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Ada

beberapa ayat Al-Qur'an yang cukup lengkap dalam menjelaskan apa itu keadilan, seperti surah Al Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁵⁰ (HR. Muslim no. 102)

⁵¹ Elis Mediawati, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Ekonomi Islam, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa tahun), hlm. 217–218

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sampai golongan itu kembali kepada peraturan Allah. Jika ia kembali (kepada Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁵²

Allah Juga berfirman dalam surah An nisa’ Ayat 58 yang

berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sebaik-baik yang diperintahkan Allah kepadamu adalah yang demikian itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² QS Hujurat, (49), : 9.

⁵³ QS An nisa’, (4), : 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif dan Normatif. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dilakukannya penelitian ini di lapangan, untuk menginterpretasikan fakta relevan secara menyeluruh.⁵⁴ Metode ini memperoleh data melalui wawancara, observasi langsung, atau analisis dokumen yang telah tersedia, serta menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks yang diteliti.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memungkinkan keterlibatan langsung di lapangan, sehingga dapat memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dan melakukan analisis secara menyeluruh tentang peran audit internal dalam mengoptimalkan dari prinsip *Good Governance* dengan perspektif islam di PPID Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat dilaksanakannya penelitian. Wilayah penelitian umumnya mencakup lokasi seperti desa, organisasi, instansi, peristiwa, teks, dan sebagainya, serta unit analisis yang

⁵⁴ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press , 2015), 3-4, <https://rb.gv/s9qhj>.

⁵⁵ J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 64, <https://osf.io/mfzuj/download>.

digunakan. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu kantor pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.⁵⁶

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut yaitu karena Sebagai lembaga publik, PPID Jember berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi. Audit internal dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana informasi harus disampaikan secara efektif kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan etika dan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keterbukaan (transparansi) dan tanggung jawab terhadap publik. Tidak hanya itu, Jember juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki masyarakat dengan *background* keagamaan yang kuat. Menerapkan *Good Governance* berdasarkan perspektif Islam menjadi relevan di wilayah ini karena prinsip-prinsip dalam *Good Governance*, seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, dapat dikaitkan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, bukan menutup kemungkinan bahwa akan adanya kendala yang terjadi ketika penerapan prinsip *Good Governance* tersebut. Oleh sebab itu, kini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pada PPID jember untuk membuktikan apakah penerapan prinsip *Good Governance* sudah diterapkan dengan optimal di PPID Jember, karena hal tersebut perlu adanya penelitian lebih dalam terkait pembahasannya.

⁵⁶ Tim Penyusun (2021) "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember

C. Subyek Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan, termasuk data yang ingin dikumpulkan, siapa yang menjadi informan atau narasumber, serta metode pengumpulan data yang menjamin validitasnya. Dalam penentuan informan untuk mengetahui sumber data dilakukan wawancara secara langsung, yaitu memilah dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁷

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan yaitu :

1. Bapak Iqbal (Inspektur)
2. Ibu Sonia (Inspektur)
3. Bapak Rahmat (Kominfo)

Data-data yang ingin diperoleh meliputi profil PPID Jember, visi dan misi PPID Jember, Struktur pemerintahan PPID Jember, efektifitas penerapan *Good Governance* di PPID Jember, dan dokumen lain yang dibutuhkan berhubungan dengan peran audit internal di PPID Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena mengumpulkan data adalah tujuan utama penelitian, prosedur pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam proses penelitian. Tanpa menguasai metode ini, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi.⁵⁸ Tujuan utama teknik pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mencapai tujuan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008), 216.

⁵⁸ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 120

penelitian. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan untuk pengumpulan data oleh peneliti yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh informasi dan memahami fenomena yang diteliti. Baik observasi langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat dalam mengungkap kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan tahapan observasi untuk memperoleh data tertulis yang dianggap penting.⁵⁹ Observasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi dan kendala peran audit internal dalam pengoptimalan *Good Governance* menurut pandangan syariah islam. Oleh sebab itu, observasi yang dilakukan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jember dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dan tidak langsung antara

lain sebagai berikut:

1) Letak lokasi yang cukup akurat dari PPID Jember.

2) Menemukan data yang cukup relevan dalam eksplor data peran audit internal dalam mengoptimalkan penerapan dari *Good Governance*.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2008).

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab guna memperoleh data yang dibutuhkan terkait objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara bebas tanpa panduan yang tersusun secara sistematis dan rinci. Pedoman wawancaranya hanya berupa garis besar topik yang akan dibahas.⁶⁰ Adapun penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang efektif dan kompleks dalam penerapan *Good Governance* itu sendiri di PPID Jember. Adapun nantinya data yang akan dibutuhkan melalui wawancara ini sebagai berikut:

1. Peran Audit internal dalam di PPID Jember.
2. Pengoptimalan Penerapan Prinsip *Good Governance* di PPID Jember.
3. Kendala dalam implementasi prinsip *Good Governance*.

3. Dokumentasi

Tulisan, foto, atau karya sejarah seseorang dapat dianggap sebagai dokumen. Dokumen profil PPID Kabupaten Jember, dokumentasi wawancara, dan dokumentasi penelitian yang berupa peraturan dan perundang-undangan. Pendekatan dokumentasi mencakup hal-hal yang

⁶⁰ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press , 2015), 106-107.

diperlukan untuk penelitian dan digunakan sebagai tambahan dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengidentifikasi dan menyusun data secara sistematis, baik yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lainnya, agar mudah dipahami dan temuan yang dihasilkan dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memecahnya menjadi unit-unit, menyintesis, menyusun pola, memilih informasi penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁶¹

Teknik analisis data kualitatif penelitian ini digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengolah data sehingga dapat memberikan uraian informasi terkait peran audit internal dalam mengoptimalkan penerapan Prinsip *Good Governance* di PPID Jember.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan dan dijelaskan dengan baik, validitas data harus diperiksa. Triangulasi adalah metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.⁶² Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang sudah ada. Dengan

⁶¹ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press , 2015), 113.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008), 274, <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Rnd>.

menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga sekaligus menguji keakuratan data melalui berbagai teknik dan sumber tersebut.⁶³ Pada penelitian ini, keabsahan data penelitian diuji menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data dari wawancara mendalam dengan pengelola dana desa dan analisis dokumen resmi, yang selanjutnya diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

Triangulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data untuk memeriksa validitas temuan penelitian. Oleh karena itu, triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen untuk memperkuat keandalan data. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, triangulasi memungkinkan konsolidasi informasi, di mana keunggulan satu metode bisa mengimbangi kelemahan metode lainnya, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan komprehensif.⁶⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini bertujuan menjelaskan langkah-langkah sistematis yang harus dijalani oleh peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: a) Tahapan persiapan, b) Tahapan pekerjaan lapangan, dan c) Tahap analisis data.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2008), 241.

⁶⁴ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan IX*, no. 1 (2021): 1–8.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian yaitu :

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan objek penelitian
- c. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengajuan judul yakni, Identitas Mahasiswa, Judul skripsi, Latar belakang, rumusan masalah, metode, dan daftar bacaan yang relevan.
- d. Konsultasi judul dengan Dosen pembimbing
- e. Mengurus Perizinan
- f. Menjajaki dan menilai lapangan
- g. Memilih dan memanfaatkan informan
- h. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- i. Persoalan etika dalam penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah peneliti mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi untuk melakukan penelitian, peneliti langsung menuju ke subjek penelitian untuk mengumpulkan data, dimulai dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan Implementasi pada peran audit internal dalam mengoptimalkan

prinsip *Good Governance* dengan perspektif islam di PPID Jember.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan fase akhir dalam penelitian, di mana peneliti mengolah data, mengurus perizinan selesai, dan memastikan data sudah valid serta lengkap. Selanjutnya, data dianalisis dan disusun menjadi karya ilmiah sesuai ketentuan di UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah singkat PPID Jember

Berdirinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jember, baik di tingkat pemerintah maupun di Universitas Jember, merupakan hasil dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini diundangkan secara efektif pada 30 April 2010 dan menjadi dasar bagi pembentukan PPID di berbagai instansi publik, termasuk di Jember. PPID Jember, baik di Pemkab Jember, maupun di Universitas Jember, dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Pada awalnya, implementasi UU KIP di Kabupaten Jember berjalan lambat. Hingga tahun 2011, Jember

termasuk dalam 28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum membentuk PPID. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Joko Tetuko, yang mendorong Pemkab Jember untuk segera membentuk PPID guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. PPID bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik yang dimiliki oleh badan publik. Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶⁵ Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting yang akan mendorong

terciptanya iklim transparansi. Orang-orang menjadi semakin bersemangat untuk belajar, terutama di era yang serba terbuka ini.

Karena implementasi UU KIP merupakan perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat, negara, dan negara beroperasi, maka setiap orang di negara ini perlu menyadari bahwa semua badan dan lembaga pemerintah yang menangani informasi harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tata kelola

⁶⁵ <https://ppid.jemberkab.go.id/profil-ppid-tentang>

pemerintahan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, termasuk ke dalam cakupan Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

B. Visi dan Misi PPID

a. Visi

Terwujudnya PPID Utama Kabupaten Jember yang handal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

b. Misi

1) Menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat terhadap informasi publik yang dibutuhkan.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik yang tersedia.

3) Mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik yang efektif dan efisien.

4) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

- 5) Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya informasi publik.

2. Struktur Organisasi

a. Pembina

Tugas Pokok: Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

b. Atasan PPID (biasanya Sekretaris Daerah)

Tugas Pokok: Membuat kebijakan umum terkait layanan informasi; menyelesaikan sengketa informasi di tingkat internal.

c. PPID Utama (biasanya Kepala Dinas Kominfo)

Tugas Pokok: Menyusun dan mengkoordinasikan pelayanan informasi. Menentukan informasi yang bisa dan tidak bisa diakses publik. Membuat Daftar Informasi Publik (DIP). Melaksanakan pengklasifikasian informasi.

d. Tim Pertimbangan bagian Audit Internal (Inspektorat)

Tugas Pokok: melakukan audit internal terhadap pengelolaan informasi publik, termasuk dokumentasi, pelayanan informasi dan pengaduan publik.

e. Bidang/Divisi di bawah PPID Utama:

- 1) Bidang Pelayanan Informasi Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Menerima, memproses, dan menjawab permintaan informasi. Mengelola meja layanan informasi (offline maupun online).

- 2) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Mengelola penyimpanan dan dokumentasi informasi/dokumen. Melakukan pengarsipan elektronik dan fisik. Memastikan informasi yang tersedia mudah dicari dan diakses.
- 3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan informasi. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa informasi.
- 4) Bidang Pengelolaan Website dan Media Informasi Mengelola portal PPID dan mempublikasikan informasi. Menjaga update berita/informasi di website resmi PPID.
- 5) PPID Pelaksana (di setiap OPD/Perangkat Daerah) Tugas Pokok: Membantu PPID Utama dalam menyediakan informasi yang dikuasai oleh unit kerja masing-masing. Mengkoordinasikan pelayanan informasi di tingkat OPD.⁶⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ <https://ppid.jemberkab.go.id/profil-ppid-struktur-organisasi>

**STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI
SUSUNAN ORGANISASI PLID
ATAU DISEBUT JUGA
BAGAN ORGANISASI PPID**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PPID Jember
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini melibatkan penguraian temuan-temuan yang diperoleh dan menghubungkannya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, data yang relevan diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan informasi, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mempercepat jalannya penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, data yang terkumpul akan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran audit internal dalam mengoptimalkan prinsip *Good Governance* :

1. Peran *Internal Audit* Pada Mengoptimalkan Penerapan Prinsip *Good Governance* Di PPID Jember

a. Peranan Audit Internal di PPID Jember

Audit Internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap kegiatan-kegiatan organisasi untuk

memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi, serta untuk mengetahui apakah

pengendalian internal telah berjalan secara efektif.⁶⁷ Maka audit internal memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga PPID Jember.

⁶⁷ Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“Audit internal disini merupakan proses penilaian independen yang dilakukan APIP untuk memastikan organisasi tetap dalam jalannya mencapai tujuan, APIP disini adalah Aparat Pengawasan Intern Daerah. Iya pasti, setiap lembaga pemerintah pasti menerapkan audit internal khususnya pada lembaga PPID ini, karena satu alasan kuat adalah PPID ini suatu lembaga publik yang sentuhannya langsung dengan masyarakat, jadi perlu adanya audit internal untuk memastikan keefektifan dan keefisiensinya kinerja kami.”⁶⁸

Dilanjut oleh Ibu Sonia selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“Audit internal itu semacam pengecekan yang bersifat independen, biasanya audit disini bertujuan untuk mewujudkan apa apa yang sudah menjadi rencana dari PPID ini. Tentu di PPID sendiri ini sudah menerapkannya, audit ini sangat amat penting, soalnya kita terjun langsung kepada publik.”⁶⁹

Bapak Rahmat selaku Divisi Kominfo juga menyatakan :

“Audit internal dalam konteks ini merujuk pada suatu kegiatan evaluasi independen yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuannya. APIP sendiri merupakan pengawas internal pada tingkat daerah. Tentu saja, setiap instansi pemerintah pasti memiliki mekanisme audit internal, termasuk di lembaga PPID ini. Hal tersebut sangat penting karena PPID adalah lembaga publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga diperlukan audit internal untuk menjamin kinerja yang efektif dan efisien.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas, dapat dideskripsikan bahwa Audit Internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan proses penilaian

⁶⁸ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁶⁹ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷⁰ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025

independen yang penting untuk memastikan organisasi, khususnya lembaga publik seperti PPID Jember. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi publik tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPID Jember audit internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga publik yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, PPID memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin transparansi informasi, serta menyelenggarakan layanan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, audit internal yang dilakukan oleh APIP bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol strategis dalam mengevaluasi kinerja, mendeteksi kelemahan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat membangun. Dengan adanya audit internal yang kuat dan berkelanjutan, PPID Jember dapat menjaga kualitas pelayanan informasi publik, meningkatkan akuntabilitas internal, serta mendorong pencapaian prinsip-prinsip *Good Governance* secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

a) Ruang Lingkup

Audit Internal memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas tata kelola, pengelolaan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas. Tidak hanya itu, dalam memberikan pengawasan yang insentif disetiap kinerja organisasi khususnya pada PPID Jember, audit internal memiliki beberapa macam jenis audit dengan ruang lingkup dan fungsi yang berbeda.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat:

“Jenis audit internal yang kami lakukan ada beberapa. Pertama, audit kinerja, yang mengevaluasi sejauh mana suatu program atau kegiatan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Kedua, audit kepatuhan, ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada juga audit keuangan, yang memeriksa apakah laporan keuangan yang disusun oleh OPD sudah andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan satu lagi adalah Probitas Audit, yakni proses audit yang bukan hanya mendeteksi kesalahan setelah terjadi, tetapi mencegah pelanggaran sebelum proyek berjalan terlalu jauh, atau bisa dibilang pelaksanaan audit yang dilakukan pada saat program kerja sedang dilakukan.”⁷¹

Dilanjut oleh Bu Sonia selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa :

“Pada PPID sendiri menerapkan beberapa macam audit yang memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, ya salah satunya adalah audit kinerja dan audit kepatuhan, yang dimana fungsinya adalah untuk mereview serta mengevaluasi kinerja yang sedang dan sudah dilakukan.”⁷²

bapak Rahmat selaku divisi Kominfo juga menyatakan :

“PPID menerapkan berbagai jenis audit dengan cakupan dan peran yang beragam. Di antaranya adalah audit kinerja dan audit

⁷¹ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷² Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

kepatuhan, yang berfungsi untuk meninjau serta menilai efektivitas pelaksanaan tugas yang sedang maupun telah dijalankan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat dijelaskan bahwa Audit Internal yang dilakukan di PPID Jember mencakup berbagai jenis untuk memastikan pengelolaan program dan kegiatan berjalan secara optimal. Dalam lembaga Publik khususnya PPID Jember audit kinerja bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sementara audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Audit keuangan difokuskan pada keandalan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Selain itu, terdapat Probitas Audit yang bersifat preventif dengan melakukan pengawasan sejak awal pelaksanaan program guna mencegah potensi pelanggaran. Keempat jenis audit ini saling melengkapi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama pada PPID Jember.

b) Peran Audit Internal

Audit Internal memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang objektif terkait efektivitas, efisiensi, risiko, dan kepatuhan dalam pelaksanaan program kerja, khususnya pada lembaga PPID Jember. Di PPID Jember hasil audit menjadi dasar auditor internal dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga efektif. Terkait program kerja, idealnya seluruh program kerja instansi berada dalam lingkup

pengawasan audit internal, baik melalui audit tahunan yang direncanakan maupun pemantauan berkala berdasarkan risiko dan prioritas strategis.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“APIP dalam hal ini Inspektorat dianalogikan sebagai mata dan telinga yang dapat digunakan pimpinan untuk mendapatkan informasi strategis dalam mencapai tujuan. Audit internal sendiri merupakan salah satu instrument yang digunakan pimpinan untuk mendapat informasi tersebut. Tentu proses audit disini tidak bakal luput dari mengambil keputusan, karena proses evaluasi dan review sudah cukup untuk melakukan pertimbangan.”⁷³

Ibu Sonia selaku Divisi Inspektorat menyatakan :

“APIP disini berperan sebagai salah satu media pengawasan yang digunakan oleh pimpinan untuk memperoleh informasi tersebut. Tentunya, pelaksanaan audit tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan, sebab melalui evaluasi dan telah yang dilakukan, pimpinan telah memiliki dasar yang cukup untuk mempertimbangkan suatu kebijakan.”⁷⁴

Bapak Rahmat selaku Divisi Kominfo memberikan penjelasan tentang peranan audi internal :

“Audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi dan penelaahan yang dilakukan memberikan landasan yang kuat bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan.”⁷⁵

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal memiliki peran penting dalam

⁷³ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷⁴ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷⁵ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025

mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan. Melalui evaluasi dan telaah yang dilakukan, audit menyediakan dasar informasi yang kuat untuk mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan. Dalam konteks ini, APIP khususnya Inspektorat berfungsi sebagai mata dan telinga pimpinan, menyajikan informasi strategis guna mencapai tujuan organisasi.

c) Timeline Implementasi Audit Internal

Audit Internal pada dasarnya bekerja berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan disetujui oleh komite audit. Dalam pelaksanaan wewenangnya, audit internal mengikuti timeline atau jadwal khusus yang mencakup penjadwalan audit rutin, serta tindak lanjut atas temuan sebelumnya. Timeline ini disesuaikan dengan tingkat risiko, prioritas organisasi, dan sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan tugas audit internal tetap terarah, efisien, dan sesuai tujuan pengawasan yang telah ditetapkan. Begitupun dengan

lembaga PPID Jember, sebagai lembaga publik pemerintah tentu memiliki *planning schedule* untuk melakukan audit sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimum dalam mennetukan tujuan.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“Iya, tentu ada. Setiap tahun kami menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan, di mana seluruh kegiatan audit dan pengawasan kami dijadwalkan di situ. Timeline ini disusun berdasarkan risiko, skala prioritas, dan permintaan dari

pimpinan daerah atau bahkan permintaan audit khusus dari OPD itu sendiri.”⁷⁶

Bu Sonia juga menyatakan hal yang sependapat dengan Bapak Iqbal perihal timeline pelaksanaan daripada Audit itu sendiri :

“Pada sistem audit internal disini tentu memiliki timeline nya sendiri, meskipun ada yang memang sesuai dengan program kerja yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan, seperti halnya pada audit probitas audit, disini kami mengaudit pada setiap program kerja yang sedang kami lakukan.”⁷⁷

Kedua pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak Rahmat tentang Time Line dari Audit Internal itu sendiri:

“Sistem audit internal di sini tentunya memiliki jadwal tersendiri, meskipun dalam praktiknya seringkali sejalan dengan program kerja yang tengah berlangsung ataupun yang telah selesai. Sebagai contoh, dalam audit probitas, kami melakukan audit terhadap setiap program kerja yang sedang dijalankan.”⁷⁸

Dari data wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa kegiatan Audit Internal secara konsisten menyusun Rencana

Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) sebagai pedoman dalam menjadwalkan seluruh kegiatan audit dan pengawasan.

Penyusunan timeline dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan dari pimpinan daerah maupun OPD. Audit internal juga memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, dengan menyesuaikan kegiatan audit terhadap program kerja yang sedang atau telah dijalankan,

⁷⁶ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷⁷ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁷⁸ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025

seperti pada audit probitas yang dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan program untuk memastikan integritas dan akuntabilitas sejak awal.

b. Optimalisasi Prinsip *Good Governnace* di PPID Jember

Good Governance menuntut komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. *Good Governance* yang efektif membutuhkan koordinasi, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

a) Implementasi *Good Governance*

Pada dasarnya, prinsip *Good Governance* merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan organisasi, terutama di lingkungan lembaga PPID jember. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja dan integritas suatu lembaga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana instansi PPID ini telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau bicara tentang prinsip *Good Governance* , kami di Inspektorat sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Secara kelembagaan, kami tidak hanya menerapkan itu dalam internal kami, tetapi juga mendorong seluruh OPD untuk menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya kerja. Pada prinsip transparan dan akuntabel, kami setiap pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan tanpa ada

intervensi dari pihak manapun, begitupun dengan Responsive kami sigap dalam menerima aduan dari masyarakat, terdapat SOP pengaduan”⁷⁹

Dilanjut oleh pernyataan Bu Sonia selaku Devisi Inspektorat beliau menjelaskan bahwa:

“Kami juga membuka akses informasi publik melalui PPID, melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Jadi, penerapan *Good Governance* itu tidak hanya slogan, tapi memang menjadi pedoman dalam aktivitas pengawasan dan pelayanan kami.”⁸⁰

Ha ini juga di nyatakan oleh Bapak Rahmat :

“Melalui lembaga pemerintah ini, kami menyediakan keterbukaan informasi publik, mengawasi pengelolaan anggaran serta capaian kinerja, dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan. Dengan demikian, prinsip *Good Governance* bukan sekadar semboyan, melainkan menjadi acuan nyata dalam setiap langkah pengawasan dan pelayanan yang kami lakukan.”⁸¹

Dari data wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa Inspektorat berkomitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* , terutama akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas. Komitmen ini tidak hanya dijalankan secara internal, tetapi juga didorong untuk diterapkan oleh seluruh OPD. Setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa intervensi, serta terdapat SOP yang jelas dalam menangani aduan masyarakat secara cepat dan sigap.

⁷⁹ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁸⁰ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁸¹ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025

b) Korelasi peran Audit Internal dengan *Good Governance*

Tentu audit internal berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Melalui fungsi pengawasan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi, audit internal turut memastikan bahwa setiap prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh lini organisasi, khususnya pada PPID Jember. Pada PPID Jember disetiap program kerja yang dilaksanakan sudah dalam pengawasan audit internal.

Hal ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Iqbal selaku divisi Inspektorat:

“Betul, korelasinya sangat erat. Misalnya, prinsip akuntabilitas itu langsung kami kawal lewat audit keuangan dan audit kinerja. Prinsip transparansi kami dukung melalui evaluasi pengelolaan informasi publik dan keterbukaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi kami pantau lewat audit program kerja. Jadi bisa dikatakan, audit internal adalah salah satu instrumen utama untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Governance* itu benar-benar dijalankan, bukan hanya di dokumen tapi juga dalam praktik.”⁸²

Bu Sonia juga menanggapi pertanyaan tersebut :

"Kami mendorong transparansi dengan menilai tata kelola informasi publik serta membuka akses terhadap anggaran. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi organisasi kami awasi melalui audit terhadap pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, audit internal menjadi alat penting dalam menjamin penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* tidak hanya

⁸² Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

berhenti pada tataran administratif, tetapi juga tercermin nyata dalam pelaksanaannya."⁸³

Kedua pendapat tersebut di dukung oleh pendapatnya bapak Rahmat :

"Kami mendukung transparansi lewat evaluasi pengelolaan informasi publik dan keterbukaan dalam anggaran. Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien, kami lakukan audit terhadap program kerja. Jadi, bisa dibilang audit internal jadi salah satu alat utama buat memastikan prinsip-prinsip *Good Governance* benar-benar diterapkan, bukan cuma tertulis di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kenyataan."⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* . Akuntabilitas ditegakkan melalui audit keuangan dan kinerja, transparansi dijaga lewat evaluasi informasi publik dan keterbukaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi dipantau melalui audit program kerja. Dengan demikian, audit internal tidak hanya menjadi pengawas formal, tetapi juga instrumen utama untuk memastikan prinsip *Good Governance* terlaksana secara nyata dalam praktik, bukan sekadar tercantum dalam dokumen.

c) Kendala Audit Internal Dalam Pengoptimalan *Good Governance*

Audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* , seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang efektif. Namun,

⁸³ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁸⁴ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

dalam praktiknya, pelaksanaan audit internal sering menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang menghambat efektivitasnya. Begitupun pada PPID Jember, ada beberapa tantangan yang menjadi fokus permasalahan di PPID Jember ini.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau bicara tentang kendala ya, pasti kendala utamanya ada di SDM dan mindset, ya. Pertama, jumlah auditor kami masih terbatas dibandingkan dengan jumlah OPD dan program yang harus diawasi. Kedua, belum semua perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya pengawasan dan audit.”⁸⁵

Dilanjut oleh pernyataan Bu Sonia, beliau menjelaskan bahwa:

“Kadang ada juga resistensi terhadap hasil audit, seperti tindak lanjut yang terlambat atau bahkan tidak dilaksanakan. Selain itu, dinamika regulasi juga jadi tantangan, karena kadang aturan berubah cukup cepat dan butuh penyesuaian dari sisi pengawasan.”⁸⁶

Tidak hanya Bapak Iqbal dan juga Bu Sonia, akan tetapi Bapak Rahmat selaku Divis Kominfo juga memberikan pernyataan

terhadap kendala yang sedang terjadi pada penerapan Audit internal itu sendiri :

“Kalau membahas tantangan, kendala utama kami terletak pada sumber daya manusia dan pola pikir. Pertama, jumlah auditor yang tersedia masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya OPD dan program yang perlu diawasi. Kedua, belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kesungguhan yang sama mengenai pentingnya pengawasan dan audit.”⁸⁷

⁸⁵ Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁸⁶ Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

⁸⁷ Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa Audit Internal memegang peranan penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* , seperti keterbukaan informasi, pertanggung awaban, dan pengendalian yang efisien. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, audit internal kerap menemui berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Hal ini juga terjadi di PPID Jember, di mana terdapat sejumlah tantangan utama yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan audit internal di instansi tersebut. T antangan utama dalam pelaksanaan audit internal terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir. Jumlah auditor yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya OPD dan program yang diawasi, sementara pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan masih belum merata. Resistensi terhadap hasil audit, termasuk tindak lanjut yang lambat atau tidak dilaksanakan, juga menjadi hambatan. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat menambah kompleksitas pengawasan, karena memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dari tim audit.

2. Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Prinsip *Good Governance* Menurut Pandangan Islam Di PPID Jember

a. Audit Internal Sebagai Amanah Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu prinsip dasar yang wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk

dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Amanah tidak hanya berarti menjaga titipan secara fisik, tetapi juga mengandung makna tanggung jawab moral atas segala bentuk pekerjaan dan keputusan yang diambil oleh seseorang,⁸⁸ khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."⁸⁹

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwasanya audit internal adalah bentuk tanggung jawab atas amanah organisasi. Ketika seseorang diamanahi untuk melakukan pengawasan, maka berkhianat dalam hal ini (misalnya menyembunyikan penyimpangan) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat."⁹⁰

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang peranan yang sangat penting daripada audit internal dalam pandangan Islam.

"Dari perspektif Islam, audit syariah sangat dibutuhkan untuk memenuhi maqāsid al-Sharī'ah dan dengan demikian melindungi

⁸⁸ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amanah dalam Perspektif Islam: Tanggung Jawab Moral dan Etika Kepemimpinan, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 45.

⁸⁹ (QS. An-Nisa: 58)

⁹⁰ HR. Bukhari dan Muslim

kekayaan orang, membuat transaksi adil dan transparan untuk klien, dan mencegah setiap transaksi atau transaksi yang tidak halal (diperbolehkan). Namun, perlu dicatat bahwa audit syariah bukanlah metode yang baru dibuat, seperti yang telah diterapkan sepanjang sejarah Islam dalam bentuk hisbah (pertanggungjawaban).”⁹¹

Berdasarkan beberapa data diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Audit internal dalam perspektif Islam bukan hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga merupakan bentuk amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam ajaran Islam, amanah tidak sekedar menjaga titipan secara fisik, namun mencakup integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Selain itu, audit internal di PPID Jember telah memainkan peran penting sebagai bentuk pelaksanaan amanah, terutama dalam pengawasan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan perubahan regulasi tetap ada, namun nilai-nilai Islam menjadi pedoman kuat untuk menjaga integritas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

⁹¹ Lubis et al., 2023, hal. 1036

b. Transparansi Dalam Perspektif Islam

Salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan informasi, dan pertanggungjawaban publik. Konsep ini sangat sejalan dengan nilai tabligh dalam Islam, yaitu menyampaikan sesuatu secara jujur, utuh, dan tidak ditutup-tutupi.

Hal ini juga tercantum dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah (2) 282:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya di antara kamu dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Akan tetapi, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu merupakan muamalah yang kamu jalankan secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Janganlah penulis dan saksi-saksi itu dirugikan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah memberi pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹²

Hal ini juga diterangkan dalam hadits Muslim No.102, meskipun tidak disebutkan secara ekspilisit tentang transparansi, tapi nilai nilai yang terkandung di prinsip transparansi masih dijunjung tinggi.

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami."⁹³

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang prinsip Transparansi dalam pandangan Islam.

"Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mendorong para pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan informasi pada semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam."⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa Transparansi dalam pandangan Islam merupakan prinsip yang sejalan dengan nilai tabligh, yaitu menyampaikan informasi secara jujur, utuh, dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282, yang mendorong pencatatan dan kesaksian dalam transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman

⁹² QS Al Baqarah, (2), : 282.

⁹³ (HR. Muslim no. 102)

⁹⁴ Elis Mediawati, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Ekonomi Islam, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa tahun), hlm. 217–218

atau penipuan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan di PPID Jember, nilai transparansi ini diwujudkan melalui audit internal dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari implementasi prinsip *Good Governance*. Audit internal dalam Islam tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral (amanah) kepada publik. Dengan kata lain, penerapan transparansi dalam lembaga publik seperti PPID Jember mencerminkan nilai spiritual Islam, yang mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab.

c. Akuntabilitas Dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, prinsip akuntabilitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Islam mengajarkan bahwa setiap individu, terutama yang memegang amanah publik, akan dimintai pertanggungjawaban (hisab) atas segala tindakannya, baik dalam urusan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas sosial dan pemerintahan.

Hal ini seperti firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”⁹⁵

⁹⁵ QS Al Baqarah, (2), : 42

Prinsip Akuntabilitas ini juga disinggung dalam sebuah hadits riwayat Bukhori No 893.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."⁹⁶

Tidak hanya di Al Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam pandangan islam, kalimat ini juga tercantum pada salah satu jurnal.

"Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam segala kegiatan ekonomi."⁹⁷

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki makna yang mendalam dan bersifat fundamental. Islam mengajarkan bahwa setiap

individu, terutama yang mengemban amanah publik, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Prinsip ini dikuatkan

oleh ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadits Nabi

SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam konteks

implementasi akuntabilitas di PPID Jember, audit internal merupakan

wujud nyata dari akuntabilitas tersebut. Audit internal tidak hanya

⁹⁶ HR. Bukhari no. 893 & Muslim no. 1829

⁹⁷ Elis Mediawati, 2018, hlm. 214

berfungsi sebagai alat administratif, namun juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi di PPID Jember berjalan sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Audit Internal dalam Mengoptimalkan Penerapan prinsip *Good Governance* di PPID Jember

a. Peranan Audit Internal di PPID Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditemukan bahwa lembaga PPID Jember telah melakukan penerapan audit internal secara konsisten dengan menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) sebagai pedoman dalam penjadwalan kegiatan audit dan pengawasan. Selain itu penyusunan timeline dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan mempertimbangkan tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan dari pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan Audit Internal pada PPID Jember juga menunjukkan fleksibilitas, dengan menyesuaikan pelaksanaan audit terhadap program kerja yang sedang atau telah berjalan. Hal

tersebut dikarenakan PPID Jember adalah lembaga publik. Oleh karena itu, audit internal memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga PPID Jember.

Audit internal pada PPID terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pimpinan, dengan menyediakan informasi hasil evaluasi yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan. Dalam konteks ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, menjalankan

fungsi sebagai mata dan telinga pimpinan, menyajikan data strategis guna mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan audit internal di PPID Jember mencakup empat jenis audit, yaitu:

- 1) Audit Kinerja, untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
- 2) Audit Kepatuhan, untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Audit Probitas, yang bersifat preventif dengan fokus pada pengawasan sejak awal pelaksanaan program.

Keempat jenis audit ini saling melengkapi dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPID Jember. Audit internal yang dilakukan oleh APIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol strategis untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kelemahan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang

konstruktif. Dengan adanya sistem Audit Internal yang kuat dan berkelanjutan, PPID Jember mampu meningkatkan akuntabilitas, menjaga kualitas pelayanan informasi publik, serta memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

b. Optimalisasi Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam pengimplementasian dari prinsip *Good Governance* khususnya di PPID Jember menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang tercermin dalam komitmen institusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan responsif. Komitmen ini tidak sekadar menjadi slogan normatif, melainkan diimplementasikan secara konkrit melalui berbagai kebijakan dan mekanisme kerja yang sistematis juga berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Secara internal, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, yang diperkuat dengan pengawasan melekat serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Audit dilakukan dengan pendekatan objektif, bebas dari tekanan atau intervensi pihak manapun, guna memastikan hasil pemeriksaan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Audit Internal dilandasi oleh prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga proses dan hasilnya dapat diakses secara transparan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak hanya terbatas pada ruang lingkup internal, semangat tata kelola yang baik ini juga didorong agar menjadi standar bersama di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini

dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai *Good Governance* , pelatihan teknis, serta penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pemerintahan. Tidak hanya itu, Audit Internal juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* .

Akuntabilitas ditegakkan melalui audit keuangan dan kinerja, transparansi dijaga dengan cara mengevaluasi informasi publik dan keterbukaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi yang dipantau melalui audit program kerja. Dengan demikian, Audit Internal tidak hanya menjadi pengawas formal, tetapi juga instrumen utama untuk memastikan prinsip *Good Governance* terlaksana secara nyata dalam praktik, bukan sekadar tercantum dalam dokumen. Selanjutnya, Audit Internal turut menjamin efektivitas dan efisiensi operasional organisasi dengan melakukan penilaian menyeluruh

terhadap program kerja, prosedur internal, serta penggunaan sumber daya. Penilaian ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga prospektif, dengan memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan preventif guna meningkatkan kinerja organisasi ke depan. Dengan demikian, Audit Internal tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan secara normatif, melainkan juga berperan sebagai instrumen utama dalam membentuk budaya tata kelola

yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Keberadaan Audit Internal menjadi elemen kunci dalam menjembatani antara perumusan prinsip *Good Governance* secara teoritis dengan realisasinya dalam praktik kelembagaan yang konkret dan terukur. Tidak hanya itu, dalam implementasi audit internal dalam mengoptimalkan penerapan daripada prinsip *Good Governance*, juga memiliki kendala dari beberapa faktor, berikut temuan dari peneliti tentang tantangan yang sering dihadapi sehingga menjadi kendala terhadap implementasi yang sedang dijalani. Audit Internal memegang peranan penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti keterbukaan informasi, pertanggung awaban, dan pengendalian yang efisien. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Audit Internal kerap menemui berbagai hambatan yang dapat mengurangi

efektivitasnya. Hal ini juga terjadi di PPID Jember, di mana terdapat sejumlah tantangan utama yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan audit internal di instansi tersebut.

Tantangan utama dalam pelaksanaan audit internal terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir. Jumlah auditor yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya OPD dan program yang diawasi, sementara pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan

masih belum merata. Resistensi terhadap hasil audit, termasuk tindak lanjut yang lambat atau tidak dilaksanakan, juga menjadi hambatan. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat menambah kompleksitas pengawasan, karena memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dari tim audit.

2. Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Prinsip *Good Governance* Menurut Pandangan Islam Di PPID Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil yang ditemukan berupa Audit Internal di lingkungan PPID Jember tidak hanya dijalankan sebagai instrumen administratif yang bersifat teknis dan prosedural, akan tetapi juga dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, amanah mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada atasan atau lembaga, tetapi juga kepada Allah SWT.

Konsep ini menjadi pondasi moral dalam pelaksanaan tugas audit internal di PPID Jember, yang tercermin dalam budaya kerja dan pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Tidak hanya itu, Bahkan Prinsip transparansi yang menjadi salah satu pilar *Good Governance* diterapkan melalui audit informasi publik yang dilaksanakan secara sistematis dan terbuka. Dalam perspektif Islam, transparansi sejalan dengan nilai

tabligh, yaitu kewajiban menyampaikan informasi secara jujur, utuh, dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam setiap bentuk transaksi untuk menghindari konflik dan penyimpangan.

Audit internal PPID Jember berperan dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik bersifat valid, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga menciptakan iklim keterbukaan yang sehat dan akuntabel. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan melalui audit internal. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan, yang secara konseptual merupakan bagian dari kerangka *Good Governance*, memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Audit Internal di

PPID Jember telah menjadi wadah integratif untuk merealisasikan sinergi tersebut secara operasional, sehingga menghasilkan tata kelola yang tidak hanya profesional, tetapi juga beretika dan bernilai spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Audit Internal memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di PPID Jember, baik dari sisi sistem kelembagaan maupun praktik pelaksanaan. Pelaksanaan audit internal di PPID Jember dilakukan secara konsisten dan sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) yang mempertimbangkan tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan dari pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Audit internal juga menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, dengan menyesuaikan audit terhadap program kerja yang sedang atau telah berjalan. Empat jenis audit yang dilaksanakan, yaitu audit kinerja, audit kepatuhan, audit probity, dan audit keuangan, saling melengkapi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Audit Internal terbukti mendorong penerapan prinsip *Good Governance*, seperti Akuntabilitas melalui audit keuangan dan kinerja, Transparansi melalui evaluasi keterbukaan informasi publik, Efektivitas dan efisiensi melalui audit program kerja dan pengelolaan sumber daya. Namun demikian, pelaksanaan audit

internal di PPID Jember juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) auditor yang tidak sebanding dengan jumlah OPD dan kompleksitas program, Kurangnya pemahaman dan resistensi dari beberapa perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan dan hasil audit, Perubahan regulasi yang cepat, yang menuntut adaptasi dan pembaruan berkelanjutan dari auditor.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal di lingkungan PPID Jember tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif yang bersifat teknis dan prosedural saja, akan tetapi juga dimaknai sebagai pelaksanaan amanah yang mengandung dimensi moral dan spiritual dalam perspektif Islam. Audit internal dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang tidak hanya ditujukan kepada institusi atau atasan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.. Hal ini tercermin dari budaya kerja dan proses pengambilan keputusan yang etis dan berlandaskan nilai-nilai Islami, di mana konsep amanah dan tabligh menjadi landasan moral dalam pengawasan dan penyampaian informasi publik. Prinsip transparansi yang merupakan salah satu pilar utama Good Governance diimplementasikan melalui audit informasi publik yang terbuka dan sistematis, sejalan dengan nilai tabligh dalam

Islam, yakni kewajiban menyampaikan informasi secara benar dan tidak ditutupi, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Audit internal di PPID Jember berperan penting dalam menjamin validitas, akurasi, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, sehingga menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya keselarasan yang erat antara prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, audit internal di PPID Jember berfungsi sebagai wadah integratif yang mampu menggabungkan profesionalisme dengan nilai-nilai etika dan spiritual, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam perspektif Islam.

B. Saran

1. Dari kesimpulan yang dapat kita uraikan diatas, terdapat beberapa kekurangan terhadap poin penelitian ini yakni, Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar tidak hanya fokus pada PPID Jember, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga publik lainnya guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan. Disarankan agar penelitian serupa di masa depan menggunakan metode campuran untuk memperkaya data, seperti menyertakan analisis statistik, survei kepuasan publik, atau evaluasi pencapaian kinerja setelah audit dilakukan. Tidak hanya

itu, disarankan Penelitian mendatang sebaiknya mengevaluasi sejauh mana rekomendasi dari audit internal diimplementasikan, serta menilai dampaknya terhadap perbaikan tata kelola, untuk melihat efektivitas peran audit dalam jangka panjang.

2. Untuk saran yang selanjutnya adalah Untuk memperdalam dimensi spiritual dan moral dalam audit internal, disarankan agar penelitian mendatang lebih mengkaji referensi fikih muamalah, etika kerja Islami, serta teori-teori audit dalam perspektif syariah secara lebih spesifik, kompleks, efektif, menyeluruh dan akademis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTKA

- Andayani. *Audit Internal* (edisi 1). Yogyakarta: BPFE- YOGYAKARTA, 2008
- Anggara Berwin, Siti Septi Ariani, “Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan *Fraud* di Institusi Pemerintahan”, *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, (2025): 1418-1435
- Az Zahro, Nurul Laili, Nur Ika Mauliyah, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang”. *JEBMAK*, (2022): 9-16
- Dr.H.Fauzan, *Sistem Pengendalian Internal*. Tangerang: Indigo Media, 2024
- Hamdani. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Hermansyah, A. “Pengaruh Auditor Eksternal dan Internal Auditor pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance*”. *Jurnal Trikonomika*. (Februari 2017): Hal. 37-47
- Iis Nurlela, Yenyen Susilawati, “Analisis Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan *Literature Review* Terindeks Sinta”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, (2024): 70-78
- J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Kusumawati, N. A. Peran Audit Internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Riset Mahasiswa*, (2016): 2337-56
- Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press , 2015
- Masruroh Afi, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, “Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, (2024): 49-56
- Maylia Pramono Sari, R.”Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Badan Layanan Umum (BLU) Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, (2012): 1-10
- Mediawati Elis, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Ekonomi Islam*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020

- Musfiroh Luluk, et al, “*Corporate Governance, Intellectual Capital, Financial Performance dan Firm Value pada Perusahaan Farmasi di BEI*”, *Journal manajemen dan Bisnis*, (2021):14-25
- Nopriyanto Anjar, “Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik”, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, (2025): 1-11
- Nugroho, D. P. *Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Sektor Publik*. Jakarta: 2012
- Putra, V. D. cahaya. *Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung*. Bandung: 2014
- Qianqian Chen, Zhi Chen, “*Mandatory internal control audit and corporate financialization*”. *Finance Research Letters*, (2024): 1-10
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. “Tata Kelola Pelayanan yang baik dengan menggunakan banyak lembaga dalam Pengelolaan Zakat”. *IJMAS*, (2023): 16-28
- Ricky, “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud Dalam Laporan Keuangan”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, (2024): 18687-18691
- Rismawati, Muh. Yusuf Q, A. R. asriani. “Pengaruh Internal Audit Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. FIF Cabang Palopo”. *Jurnal Akuntansi*, No. 01. (2015): 1-11
- Setiati Fita, “Menelisik Spirit Profetik Konsep Audit Internal dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, *JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS*, (2022): 36-46
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, (2008).
- Suhuliah, Lilis Putri Nufia Sari, Dimas Fitrianto, Denari Dhahana Edtiyarsih, Sri Irawan Laras Prasojoe, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Keuangan Proyek Sumber Daya Air Di Era Perubahan Iklim: Studi kasus Bendung Tugusari”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, (2025): 320-330

- Sukandani Yuni, Dessy Dwi Marta, dkk, "Peran Audit Internal dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud)", *Jurnal Inovasi dan Tren*, (2024): 522-526
- Sukmawan Huda, Machmudin Eka Prasetya, "Evaluasi Peran Audit Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, (2025): 262-274
- Syafithri Yuyun, Tertiaro Wahyudi, dkk, "Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: Systematic Literature Review", vol 9, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, (2025):512-528
- Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, et a."Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (2024): 1-5.
- W. Rahayu Kurnia Siti. *Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Survei pada Bank BUMN dikota Bandung)*. Bandung: 2014
- Xia Yanchun, Huan Zhang, Shijun Guo, "Mandatory internal control audits and management earnings forecast". *Pacific-Basin Finance Journal*, (2024): 1-9
- Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabets, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 2 : Matrik Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Keaslian Penulis
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Biodata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Ditinjau Dari Perspektif Islam di PPID Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. <i>Good Governance</i> 3. Perspektif Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan 2. Pengoptimalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a) Audit Internal/Inspektorat b) Karyawan yang berhubungan c) Staff Operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif dan Normatif 3. Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 4. Analisis data : Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif interaktif, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 5. Keabsahan data menggunakan sumber dan teknik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran internal audit pada mengoptimalkan penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di PPID Jember? 2. Bagaimana peran internal audit pada mengoptimalkan penerapan prinsip <i>Good Governance</i> menurut Pandangan Islam di PPID Jember?

SURAT KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211105030019
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan audit internal, dan apakah instansi ini sudah menerapkannya?
2. Jenis audit apa saja yang diterapkan pada instansi ini dan seperti apa fungsi dan ruang lingkup dari masing masing audit internal tersebut?
3. Apa saja kontribusi audit internal dalam mengambil keputusan, apakah setiap program kerja yang ada pada instansi ini sudah dalam pengawasan audit internal?
4. Apakah ada timeline sendiri untuk audit internal ini dalam melakukan setiap wewenangnya?
5. Pada dasarnya, setiap organisasi khususnya pada instansi pemerintah tentu menerapkan daripada prinsip *Good Governance*, jadi seberapa jauh instansi ini menerapkannya?
6. Jika dikorelasikan dengan audit internal, apakah pada setiap prinsip dari *Good Governance* tersebut sudah berada di bawah pengawasan audit internal?
7. Sejauh ini, apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangan dalam meng implementasikan audit internal itu sendiri dalam rangka mengoptimalkan dari implementasi prinsip *Good Governance* itu sendiri?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-08 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember
Jl. Letjen S.Paman No.89, Tegal Boto Kidul, Karangrejo, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur.68124

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211105030019
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisni Islam
Prodi : Akuntansi syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Peranan Audit Internal Dalam mendukung Visi Misi Di PPID Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. Nusantara No.02 (Area Balai Serba Guna) TELP. (0331) 5102507
Website : www.diskominfo.jemberkab.go.id Laman : diskominfo@jemberkab.go.id

Jember, 28 Mei 2025

Nomor : 800.1.4.1/ 148 /35.09.323/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan
Penelitian.

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

di- J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 704/0011/415/2025 tanggal 03 Januari 2025 Perihal Ijin Penelitian. Keperluan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian Tugas Akhir/Skripsi PPID Kabupaten Jember di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Bersama surat ini kami memberitahukan Mahasiswa :

Nama : KHOIRUL UMAM
NIM : 211105030019
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mulai tanggal 3 Januari 2025 s/d 16 Mei 2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

ADI KUSNANDAR ZULKIFLI. A.H, SH, MM
Pembina EMB
NIP. 197910042011011005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Wawancara dengan Bapak Iqbal

2. Wawancara dengan Ibu Sonia

3. Wawancara dengan Bapak Rahmat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: <http://uinckhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211105030019
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Penerapan Prinsip *Good Governance* Ditinjau Dari Perspektif Islam di PPID Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Maret 2025
Operator Dribit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hi. Mariah Ulfah, S.A., M.E.
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

J. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinjbas.ac.id Website: <http://febi.uinjbas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211105030019
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Mei 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak.
198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT**

KODE 21

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT</p> <p align="center">Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1 Telp. (0331) 428823 Jember</p>	Nomor SOP	700/SOP/21/35.09.410/2024
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pergesahan	
	Disahkan Oleh	<p align="center">RATNO G. SEMBODO, SH. Pemohon TK 1 NIP. 19740827 200501 1 006</p>
Nama SOP	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang pendidikan minimal S, I semua jurusan; 2. Mampu mengoperasikan Komputer; 3. Memiliki Pengetahuan Tentang Pemeriksaan; 4. Memahami Peraturan Perundang yang berlaku;
---	--

<ol style="list-style-type: none"> 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember. 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Instrumen Pemeriksaan, Laptop, Printer, ATK, Kertas Kerja</p>
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat/Dokumen Masuk dan Keluar 2. SOP Pembuatan Surat Undangan 3. SOP Pelaksanaan Pemeriksa 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Perundang-Undangan 4. Instrumen/formulir/Kertas Kerja Pemeriksaan 5. Program kerja pemeriksaan
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja tidak terelisasi dengan baik, jika tidak dilakukan persiapan; 2. Pelaksanaan Pemeriksaan akan berjalan lebih baik, jika dilakukan persiapan terlebih dahulu; 	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudaman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el inspektorat@jemberkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 700.1.1.2/ 84/IR.1 /PDTT /35.09.410/2025

- D a s a r** :
1. Peraturan Bupati Jember No. 71 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
 2. Peraturan Bupati Jember No. 28 Th 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
 3. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember TA. 2025 Nomor DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 10 April 2025
 5. Surat dari Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Nomor: 800.1.6.2/2194/35.09.414/2025 Tanggal 25 April 2025 Perihal Undangan Untuk Melakukan Permintaan Keterangan PNS a.n Sdri. Siti Maohfroh. S. Pd.I NIP. 196506011987032015

MEMERINTAHKAN

- Kepada** :
1. Penanggung Jawab	Ratno C. Sembodo, S.H.
2. Wakil Penanggung Jawab	Adif Candra P, S.E.
3. Pengawas Tim	Penny Artha Medya, SE.
4. Ketua Tim	Evy Mustikasari T A, S.Psi., M.Si.
5. Anggota	Sulik Aspiin, S.E.
6. Anggota	Siti Nurhasanah, S.E.
7. Anggota	Ahmad Rizqi Arief F, S.T.P
8. Anggota	Sonia Vitania Hubah, A.Md.Ak.
9. Anggota	Seger Hariono, S.A.P.

Untuk : Melaksanakan Lanjutan Tugas Sebagai Tim Pemeriksa Tindak Lanjut Hasil Satgas Percepatan Permasalahan Non ASN Kabupaten Jember

Waktu Pelaksanaan : Pada tanggal, 28 dan 29 April 2025

Kepada pihak-pihak yang bersangkutan diminta kesediaannya untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan demi kelancaran dan penyelesaian tugas.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 April 2025
a.n. Bupati Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

RATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740827 200501 1 006

Tembusan:
- Bupati Jember

Pemberi dan penerima suap sama-sama dikenakan sanksi pidana

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211105030019
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 17 Februari 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Romalaka Desa Karang Cempaka Kecamatan
Bluto Kabupaten Sumenep
No. Handphone : 081-918-401-987
Status : Belum Kawin/Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi : Akuntansi Syariah
Email : umamk5044@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah : MI. Tarbiyyatul Athfal (2009-2015)
Madrasah Tsanawiyah : MTS. NURUL ISLAM (2015-2018)
Madrasah Aliyah : MA. NURUL ISLAM (2018-2021)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember (2021-2025).

Motto Hidup

“Belajar Dari Kesalahan Orang Lain Adalah Guru Yang Terbaik”